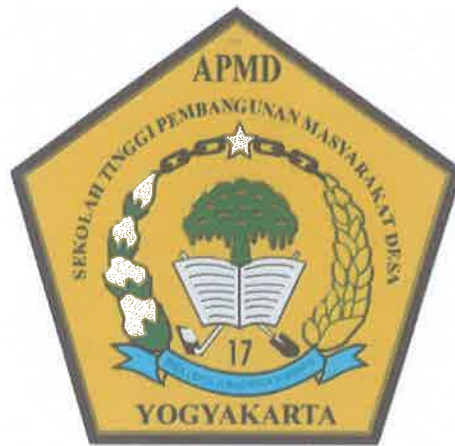


# **SKRIPSI**

## **PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN**

**( Penelitian BUM Kal Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta )**



**Disusun Oleh:**

**SALFAN CHALVIN TURUPAITA LANDUNAU HUKI**

**21520009**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI  
KALURAHAN  
( Penelitian BUM Kal Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta )**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

**Disusun Oleh:**

**SALFAN CHALVIN TURUPAITA LANDUNAU HUKI  
21520009**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Februari 2025  
Jam : 13.00  
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

**Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.**  
Ketua Penguji / Pembimbing

**Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si.**  
Penguji Sampung I

**Analius Giawa, S.IP., M.Si.**  
Penguji Sampung II



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

**Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salfan Chalvin Turupaita Landunau Huki  
NIM : 21520009  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN (Penelitian BUM Kal Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”** adalah karya tulis yang saya buat sendiri, disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan data atau pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025



**Salfan Chalvin Turupaita Landunau Huki**  
**21520009**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap	: Salfan Chalvin Turupaita Landunau Huki
NIM	: 21520009
Telp	: 085337528044
Email	: alfanhk27@gmail.com
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN (Penelitian BUM Kal Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)"**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Maret 2025

pernyataan



Salfan Chalvin Turupaita Landunau Huki  
21520009

## MOTTO

“Batasi pandanganmu dari nikmat orang lain, agar rasa syukurmu tak redup”

~ *Alfan Huki* ~

“Jangan khawatir membuat kemajuan yang lambat, namun khawatirlah ketika kamu tidak membuat pergerakan”

~ *Alfan Huki* ~

“Lebih baik teguran nyata, daripada kasih yang tersembunyi”

~ *Amsal 27:5* ~

“Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka”

~ *Amsal 31:9* ~

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”

~ *Pramoedya Ananta Toer* ~

“Kegagalan dalam apapun adalah guru terbaik, maka harus di terima sebagai kenyataan yang bijaksana”

~ *Pramoedya Ananta Toer* ~

“Dunia sudah cukup menyiapkan kebutuhan manusia, namun tidak untuk keserakahannya”

~ *Mahatma Gandhi* ~

“Kebebasan tidak pernah di berikan secara sukarela oleh penindas, melainkan harus dituntut oleh yang tertindas”

~ *Marthin Luther King Jr* ~

“Ketidaktahuan adalah akar dari banyak penyakit”

~ *Fidel Castro* ~

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, hikmat dan tuntunan-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada setiap pihak yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, dukungan, kekuatan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pengetahuan, dan tuntunanNya serta perlindunganNya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang yang sangat berarti dalam hidup saya yakni, Bapak Stefanus Panda Huki dan Ibu Salomi Kamara Praing yang sudah berjuang dalam menuntun garis hidup saya sampai dengan saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan hikmat oleh Tuhan Yesus Kristus dalam setiap pergumulan kehidupan. Amin.
3. Kepada adik-adik saya Salvin Dwi Putra Dundu Huki dan Satriyanti Rambu Babang Huki dan kakak Arni Yaku Danga, Yizilia Rambu Babang Amah dan Irene Yael Rambu Banja Uru.
4. Kepada keluarga tercinta saya Nenek Lidia Babang Amah, Bapak Liwar Jelik Paruhani, Bapak Petrus Waluwandja, Almh Ibu May Nanu, Almh Ibu Ester Kamara Praing, Om Daud Kamara Praing, Ci Marlina Konda Ngguna, Kakak Abzalom Dundu Tay, Kakak Aprianus Haing Hambatana, Kakak Daniel Ndula Aha, Kakak Morison Nggiku Waluwanja, Kakak Defrinus Waluwanjsa Kakak Yesiyani Waluwandja, Kakak Yizrael Kamara Praing, Yitro Kamara Praing, Kakak Ariel Umbu Ngaji Hamarak dan setiap nama yang belum saya sebutkan

terima kasih yang dengan caranya masing-masing memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

5. Keluarga besar Mbatapuhu - Mbarapapa - Karita La'atu untuk dukungan, doa dan nasehat yang memampukan saya untuk menyelesaikan studi ini. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A yang telah sabar membimbing dan mengajarkan saya dengan baik. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul: **“PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN (Penelitian BUM Kal Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dalam karya tulis skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Tetapi penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat diwujudkan bila tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dan sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si. Selaku dosen penguji I yang telah menyempatkan waktu untuk menguji dan mengarahkan dengan memberikan saran serta perbaikan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si. Selaku dosen penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengarahkan dengan memberikan saran serta perbaikan dalam proses menyelesaikan Skripsi ini.
5. Pemerintah Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Karyawan dan pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menempuh ilmu dan pengalaman secara akademik.
8. Untuk Crew Kos 934 Kaka M. Ilham Akbar, Derivat Umbu Siwa, Tides Umbu Remu Samapaty, Putra U. D. N, Kaka Irfan U. B. Guti, Kaka Anjas Dimu yang memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini. Semoga selalu di beri kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
9. Untuk teman-teman terkasih Dartono Bokamanu, Agnes H. Kota, Ray Pratama, Andiansen UH, Rain Tania, Fahri, Rifal, Anna, Audi, Mikie Ezakt, Iko, Ryan Santula, Elsavan, dan yang belum saya sebutkan terima kasih sudah memberikan semangat dan menjadi teman diskusi saya selama menyelesaikan studi ini. Semoga senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.
10. Kepada Organisasi, Serikat Mahasiswa Indonesia Komisariat STPMMD “APMD” Cabang Yogyakarta yang telah menjadi rumah ideologis untuk belajar dan berdinamika. Teruslah membesar dan senantiasa memperjuangkan

kepentingan rakyat tertindas demi mewujudkan Pembebasan Nasional  
Melawan Imperialisme. Cerdas Militer Merakyat!!

11. Kepada organisasi keluarga SUMBA APMD dan Gailaru marada Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri di luar lingkungan akademik. Semoga terus solid dan terus menjunjung nilai-nilai kekeluargaan.
12. Kepada Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong untuk ilmu dan pengalaman yang baik di bidang jurnalistik. Semoga terus mengembangkan karya-karya jurnalistik mahasiswa yang berkualitas.
13. Kepada Pemerintah Kalurahan Triwidadi dan setiap pihak yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian di Kalurahan Triwidadi. Semoga selalu di beri Perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
14. Kepada teman-teman KKN 57 Triwidadi Padukuhan Ngincep yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir saya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan dan berkah-Nya. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi diri peneliti maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Penulis

Salfan Chalvin Turupaita Landunau Huki  
21520009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Literature Review .....	12
G. Kerangka Konseptual .....	17
1. Pemerintahan.....	17
2. Penyelenggaraan Pemerintahan .....	23
3. Potensi Desa .....	31
4. Kerja Sama .....	37
5. Program .....	42
H. Metode Penelitian .....	49
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Objek dan Subjek Penelitian .....	50
3. Lokasi Penelitian .....	52
4. Teknik Pengumpulan Data.....	53
5. Teknik Analisis Data.....	56

<b>BAB II PROFIL KALURAHAN TRIWIDADI .....</b>	<b>60</b>
A. Sejarah Kalurahan Triwidadi .....	60
B. Visi Misi Kalurahan Triwidadi .....	63
C. Kondisi Geografi.....	64
D. Kondisi Demografi.....	66
E. Kondisi Ekonomi .....	70
F. Sosial Budaya.....	72
G. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan.....	75
H. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) .....	77
<b>BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI KALURAHAN .....</b>	<b>81</b>
A. Program Pengembangan Potensi Kalurahan .....	81
B. Kerja Sama dalam Pengembangan Potensi Kalurahan .....	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Peta Kalurahan Triwidadi.....	65
Gambar 3. 1 Ruko Unit Usaha ATK.....	90
Gambar 3. 2 Lapak-lapak di alun-alun Triwidadi yang dapat disewa .....	92
Gambar 3. 3 Laba rugi BUMKal Triwidadi 2020-2024 .....	94

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Daftar Informan Penelitian.....	52
Tabel 2. 1 Tingkat Pendidikan .....	67
Tabel 2. 2 Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Triwidadi .....	69
Tabel 2. 3 Kepercayaan Masyarakat Triwidadi.....	74
Tabel 2. 4 Struktur Pemerintahan Kalurahan Triwidadi .....	75
Tabel 2. 5 Struktur BUM Kal Triwidadi.....	79

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Potensi Kalurahan Melalui BUM Kal di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam pengelolaan potensi kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) merupakan upaya untuk meningkatkan pengembangan ekonomi lokal. Fokus penelitian meliputi program pemerintah kalurahan dalam pengembangan potensi kalurahan dan Kerja sama dalam pengembangan potensi kalurahan. Dengan program pengembangan potensi kalurahan dan kerja sama dalam pengembangan potensi kalurahan maka dapat memberikan keuntungan bagi kalurahan serta masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai dengan Pengelolaan Potensi Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan melalui BUM Kal. Data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara dengan informan kunci seperti pengurus BUM Kal, pemangku kepentingan di tingkat Kalurahan, serta dokumentasi yang relevan. Proses ini dilakukan dengan perhatian khusus terhadap konteks sosial dan ekonomi setempat untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan relevan.

Hasil Penelitian ini menyoroti bahwa dalam Program Pengembangan Potensi Kalurahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya alam, manusia, dan infrastruktur. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kalurahan, masyarakat, dan stakeholders lainnya, dengan fokus pada peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. BUM Kal Triwidadi berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal melalui penyertaan modal dari pemerintah kalurahan. BUM Kal mengelola berbagai unit usaha, seperti penyewaan lapak, katering, alat tulis kantor (ATK), dan event organizer, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sinergi antara pengurus BUM Kal dan pemerintah kalurahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasional. BUM Kal juga aktif menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lokal dan organisasi masyarakat, seperti Karang Taruna dan PKK, untuk memperkuat ekonomi kalurahan. Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama, BUM Kal Triwidadi diharapkan dapat mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung. Dengan strategi kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di kalurahan Triwidadi. Namun dalam implementasinya masih belum optimal seperti dalam pendapatan bruto yang dihasilkan masih minim, sementara laporan laba rugi menunjukkan hasil yang terus mengalami kerugian sehingga belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan kalurahan.

**Kata Kunci : Pemerintah Kalurahan, Ekonomi, BUM Kal, Kerja Sama**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah kalurahan memiliki otoritas penuh atas setiap potensi sumber daya yang ada pada wilayahnya. Apalagi dalam pembangunan nasional, desa merupakan salah satu pilar utama dalam memberikan pembangunan, baik itu infrastruktur hingga pada taraf hidup masyarakatnya agar mandiri. Maka dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah kalurahan harus mampu melihat serta mengembangkan setiap potensi sumber daya yang berada pada wilayah kalurahan agar setiap potensi yang ada dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya serta melakukan upaya pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Diartho 2017).

Menurut HAW.Widjaja (2014) pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan di tingkat desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Maka urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan

bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi dari pemerintahan baik itu dari pusat, daerah, hingga desa yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan (Lexy 2021).

Potensi desa menurut Soekidjo (2009:1) yang menjelaskan bahwa pembangunan suatu bangsa memerlukan dua aset terutama atau “daya” yang disebut dengan sumber daya (resources) yakni sumber daya alam (natural resources) dan sumber daya manusia (human resources). Sehingga kedua sumber daya tersebut sangat penting apalagi pada pengembangan potensi dalam sebuah desa.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal serta organisasi warga ikut serta guna menekan, memicu, memelihara kegiatan usaha dapat menghasilkan lapangan pekerjaan. Guna menambah pembangunan wilayah, paling utama pada wilayah peKalurahan yang sebagian besar adalah wilayah pertanian serta peternakan, hingga pemerintah wilayah berupaya buat tingkatan kesejahteraan warga dengan menggali serta meningkatkan potensi-potensi yang terdapat di daerah tersebut melalui sebuah pengembangan ekonomi lokal (Susanti, Hanafi, Adiono, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya undang-undang tersebut memberikan

kebebasan kepada desa untuk mengelola desa termasuk dalam hal pengembangan potensi desa. Selain itu harapkan desa dapat menjadi lebih mandiri. Dalam mengembangkan potensi desa peran pemerintah sangatlah penting. Pengelolaan Potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama (Yuliawati R 2017).

Pemerintah desa hadir sebagai tempat atau wadah yang memberikan arahan kepada masyarakat. Jika tidak adanya pemerintah mungkin masyarakat yang belum paham, apalagi keterbatasan pengetahuan membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai potensi yang dimiliki oleh desa sehingga peran pemerintah sangatlah penting. Pengembangan potensi desa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah hadirnya BUM Des yang mana terbentuknya BUM Desa salah satu upaya memperkuat dan mengembangkan potensi desa. BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Darwita 2018).

Potensi sumber daya yang ada di kalurahan sangat beragam pada setiap kalurahan di seluruh Indonesia tergantung pada kondisi wilayah hingga pada masyarakatnya. Pada pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) untuk dapat menggerakkan roda perekonomian pada kalurahan dengan mengelola setiap potensi sumber daya yang ada di kalurahan guna meningkatkan perekonomian kalurahan. Dengan adanya BUM Desa harapannya supaya sirkulasi ekonomi masyarakat dapat langsung ke kalurahan sebagai upaya agar terjadi peningkatan perekonomian kalurahan dan meningkatkan pendapatan asli kalurahan. BUM Desa

merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah (Engkus 2021).

Pemerintah Desa dan BUM Desa selain memiliki hubungan ketika berdirinya BUM Desa, dengan keterlibatan pemerintah desa dalam partisipasi dan program kerja yang di buat oleh BUM Desa diharapkan terciptanya lembaga yang mampu mengelola usaha dengan baik. Kemudian, tentunya dalam hal ini BUM Kal tidak hanya memiliki satu unit usaha saja, namun setiap unit usaha yang ada tersebut diharapkan dapat untuk berkembang secara berkelanjutan. Sehingga dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan BUM Desa sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu BUM Desa merupakan sebuah pilar dalam kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Komersial dalam hal ini artinya BUM Desa sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusi dalam pelayanan sosial. Tujuan utama BUM Desa hadir ialah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). BUM Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan memperkuat perekonomian yang ada di desa (Darwita 2018).

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PADes), pemerintah kalurahan memegang peranan penting supaya dapat memenuhi kebutuhan

masyarakatnya. Tetapi perlu diketahui, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perubahan nomenklatur tentang penyebutan nama pemerintah dan pemerintahannya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, terdapat perubahan nomenklatur untuk penyebutan nama Lembaga Pemerintahan dan Pemerintah. Pada ketentuan umum menjelaskan bahwa: Desa disebut Kalurahan sehingga menyebabkan perubahan sebutan nama jabatan perangkat desa sesuai dengan nomenklatur baru, Dengan adanya pergantian nomenklatur Kepala Desa disebut Lurah; perangkat desa disebut Pamong Kalurahan; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebut Badan Permusyawaratan Kalurahan (BamusKal), dan Kecamatan disebut Kapanewon.

Pada salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalurahan Triwidadi memiliki Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) dengan bentuk usaha yang beragam seperti Cathering, ATK, penyewaan lapak, jasa keuangan dan EO (Event Organizer) serta jasa pengadaan. Dalam sektor jasa keuangan, BUM Desa Triwidadi berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan mikro, seperti admin dalam setor dan tarik tunai dan tabungan komunitas. Layanan ini membantu masyarakat yang kesulitan mengakses perbankan formal dan menjadi solusi untuk mendukung pengembangan usaha kecil di desa. Usaha Event Organizer (EO) BUM Kal Triwidadi dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam penyelenggaraan acara, baik skala kecil seperti hajatan keluarga maupun skala besar seperti seminar dan pelatihan. Unit usaha ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen acara sekaligus memberikan nilai tambah pada layanan lokal.

Penyediaan alat tulis kantor (ATK) merupakan bentuk usaha yang relevan di Kalurahan Triwidadi, mengingat kebutuhan yang terus meningkat dari masyarakat,

lembaga pendidikan, dan perangkat desa. Usaha ini tidak hanya memudahkan akses masyarakat terhadap ATK tetapi juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Penyewaan lapak oleh BUM Kal Triwidadi merupakan bentuk inovasi dalam mendukung pedagang lokal. Dengan menyediakan lokasi strategis untuk usaha mikro, unit ini membantu menciptakan pusat ekonomi yang terorganisir di desa, sehingga mendorong aktivitas perdagangan lokal. Usaha catering BUM Kal Triwidadi memanfaatkan potensi kuliner lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam berbagai acara. Unit ini juga menjadi salah satu upaya pemberdayaan kelompok perempuan desa, terutama ibu rumah tangga, untuk meningkatkan penghasilan keluarga.

Jasa pengadaan BUM Kal Triwidadi merupakan layanan pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan desa, seperti bantuan PPBM (Pemberian Bantuan Pangan dan Bantuan Modal Pemberdayaan). Pengadaan material untuk infrastruktur desa (bahan bangunan, peralatan, dan lain-lain). Alat-alat kebutuhan desa (peralatan kantor, peralatan kebersihan, dan lain-lain). Jasa perawatan dan perbaikan fasilitas desa. dengan prosesnya yakni permintaan dari pihak desa maupun masyarakat lalu disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran selanjutnya dipilih penyedia barang dan jasa lalu pembelian serta pengiriman setiap barang dan jasa hingga pada penerimaan lalu pembayaran serta pelaporan secara transparan dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif akan mendukung operasional BUM Kal Triwidadi secara optimal. Peran kepala desa dalam memberikan arahan strategis dan pengawasan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari keberhasilan BUM Kal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana BUM Kal Triwidadi mengelola unit usahanya, serta tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga pada penelitian ini ingin melihat sejauh mana kerja sama antara pemerintah desa Triwidadi dengan BUM Kal dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program untuk pengelolaan usaha yang ada. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi desa. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi oleh BUM Kal Triwidadi dalam mengelola usaha EO, ATK, jasa keuangan, penyewaan lapak, jasa pengadaan, dan catering. Sehingga pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah desa Triwidadi dalam memperkuat tata kelola BUM Kal, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Meskipun telah memiliki beberapa unit usaha yang berjalan, pengelolaan BUM Kal Triwidadi masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, kurangnya inovasi pemasaran, dan minimnya dukungan teknologi. Hal ini menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi desa secara maksimal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peran kepala desa dan perangkat desa sangat penting dalam mendukung operasional BUM Kal. Sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan usaha oleh BUM Kal Triwidadi. Selain itu, pemerintah desa Triwidadi juga perlu memastikan bahwa tata kelola BUM Kal berjalan secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini sebagai mitra dalam pengelolaan potensi desa.

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) merupakan lembaga ekonomi kalurahan yang di kelola oleh pemerintah kalurahan dengan tujuan agar mengelola

aset dan potensi yang ada di kalurahan demi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Berangkat dari uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kalurahan triwidadi dalam pengelolaan potensi pada BUM Kal. Selain itu penulis akan menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah kalurahan dalam membangun sinergitas antara potensi ekonomi yang ada dengan program-program pembangunan kalurahan.

Untuk mengelola kekayaan kalurahan serta menghidupkan perekonomian kalurahan, maka perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. Lembaga yang dapat menjadi wadah dan memfasilitasi setiap warga kalurahan untuk dapat memberikan kerja keras dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat kalurahan adalah BUM Kal. Dimana perencanaan, pendirian dan pelaksanaan BUM Kal diprakarsai masyarakat melalui pemerintah kalurahan. Dalam upaya pengelolaan potensi pemerintahan kalurahan Triwidadi mengeluarkan regulasi terkait dengan pengelolaan potensi yakni, Peraturan Kalurahan (PERKal) tentang Pengelolaan BUM Kal Triwidadi.

Pemerintah Kalurahan Triwidadi menetapkan Peraturan Kalurahan (PERKal) tentang Pengelolaan BUM Kal Triwidadi untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi kalurahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Kal Triwidadi memiliki struktur yakni, pimpinan tertinggi BUM Kal Triwidadi adalah Komisaris yang dijabat oleh Bapak Lurah Slamet Riyanto. Beliau bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi BUM Kal. Direktur BUM Kal yaitu Eko Setiawan, bertanggung jawab mengelola operasional perusahaan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisaris. Sekretaris, Rifai Yusuf, bertanggung jawab mengelola administrasi dan komunikasi perusahaan. Bendahara, Edi Irwanto, mengelola



keuangan perusahaan. Pengawas terdiri dari tiga orang, yaitu Sutarjan, Amar Hanif dan Shinta Putri Dika Nuryahya. Mereka bertanggung jawab mengawasi kinerja perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Adapun unit usaha (potensi) yang dikelola oleh BUM Kal Triwidadi adalah EO (Event Organizer), mengelola kegiatan acara dan event. Jasa Keuangan, menyediakan jasa keuangan seperti pinjaman dan tabungan. Jasa Pengadaan, mengelola pengadaan barang dan jasa. Sewa Lapak, mengelola penyewaan lapak untuk pedagang dan UMKM. Catering, menyediakan jasa catering. ATK (Alat Tulis Kantor), mengelola penyediaan ATK.

Pengelolaan keuangan BUM Kal Triwidadi merupakan aspek penting untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber keuangan BUM Kal berasal dari tiga sumber utama, yaitu pendapatan usaha, bantuan pemerintah dan pinjaman. Pendapatan usaha diperoleh dari berbagai unit usaha seperti EO, Jasa Keuangan, Jasa Pengadaan, Sewa Lapak, Catering dan ATK. Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk dana bantuan atau subsidi, sedangkan pinjaman diperoleh dari lembaga keuangan yang sah. Pengawasan keuangan dilakukan oleh Tim Pengawas Keuangan. Tim ini bertugas memantau pengeluaran dan penerimaan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan melaporkan temuan kepada Kepala Kalurahan. Pengawasan ini bertujuan mencegah penyelewengan dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan.

Evaluasi kinerja BUM Kal dilakukan secara berkala untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Evaluasi ini meliputi analisis keuangan, kinerja operasional dan pencapaian tujuan. Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Kalurahan dan masyarakat untuk memastikan pertanggungjawaban dan transparansi.

Penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam pengelolaan keuangan BUM Kal dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Proses ini melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil dan transparan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan BUM Kal Triwidadi dapat berjalan efektif, efisien dan transparan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam mendukung pengembangan BUM Kal Triwidadi sebagai kunci untuk mewujudkan kalurahan yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Dengan memahami pengelolaan potensi kalurahan melalui BUM Kal, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi pengembangan yang efektif. Pengembangan BUM Kal Triwidadi sangat penting karena berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan mengoptimalkan sumber daya lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemerintah kalurahan dalam pengelolaan potensi kalurahan melalui BUM Kal. Mengetahui kerja sama dalam pengembangan potensi kalurahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan BUM Kal Triwidadi dan mewujudkan kalurahan yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pemerintah kalurahan Triwidadi dalam pengelolaan potensi kalurahan? ”

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada :

1. Program kerja pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Program pengembangan potensi kalurahan oleh pemerintah kalurahan
3. Kerja sama dalam pengembangan potensi kalurahan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Menggambarkan program pemerintah kalurahan
2. Menggambarkan program pemerintah kalurahan dalam pengembangan potensi kalurahan
3. Menggambarkan kerja sama pengembangan potensi kalurahan

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendalam tentang program kerja Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam pengelolaan potensi kalurahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan terkait kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak ketiga dalam pengembangan potensi desa. Sehingga, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis, pembaca, serta pihak terkait dalam pengembangan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **F. Literature Review**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur untuk mengelaborasi dan mengkomparasikan beberapa penelitian terdahulu dan tentunya akan berkaitan dan berkesinambungan sesuai dengan penelitian yang akan di teliti. Adapun beberapa literature review yang digunakan sebagai berikut :

*Pertama*, Arham, Rasmiati, Fitriani, Yadi A dan Darmawan (2023) berjudul Potensi Desa Sebagai Sarana untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Optomalisasi Peran BUM Desa Di Desa Tokonan Kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini menemukan bahwa dalam pemanfaatan potensi desa dan juga peran BUM Desa dapat dikatakan belum optimal. Penyebab ketidak optimalan tersebut karena masyarakat belum mampu memahami pola pemanfaatan potensi yang ada di desa dan disinergikan dengan peran BUM Desa sehingga akan berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tentunya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. kondisi tersebut dapat dilihat bahwa Pelaksana Kebijakan di Desa telah berupaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan khususnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa melalui optimalisasi peran BUM Desa, namun yang dilakukan wacana untuk mengaktifkan kembali BUM Desa belum disertai dengan konsep-konsep yang akurat, sebab fokus dari pemegang kebijakan hanya berorientasi pada upaya mencari figur yang dapat dijadikan pengurus. Pada awal pembentukan BUM Desa Desa Tokkonan mengelola 3 Unit Usaha yakni Penyewaan Moleng, Usaha Jasa Konstruksi dan Pengembangan Home Industry dari Masyarakat yang dikomandoi oleh Ibu-Ibu

PKK dengan Jenis Usaha Pengelolaan Kripik Pisang. Lalu seiring berjalannya waktu kondisi berjalan kurang maksimal, karena beberapa pengurus tidak mampu lagi fokus untuk mengelola BUM Desa, sebab mereka harus mengutamakan Pekerjaan mereka selaku Pegawai atau Karyawan pada Instansi Pemerintah dan Swasta, bahkan terdapat salah satu orang Pengurus BUM Desa bekerja di Luar Kabupaten Enrekang.

Aktivitas usaha BUM Desa pun terhenti, walaupun rumah industri yang dikelola oleh ibu-ibu PKK masih berjalan hanya saja nilai tambah untuk mendukung penghasilan dari masyarakat belum nampak bahkan hanya terkesan sebagai media meningkatkan keterampilan dari ibu rumah tangga di Desa Tokkonan. Dalam hal ini rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berkeinginan terlibat dalam pengelolaan BUM Desa menjadi alasan utama pengelolaan BUM Desa tidak aktif lagi. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa disebabkan karena pemahaman pada prosedur pengelolaan BUM Desa yang minim, Pemberian keterampilan tentang pola pengembangan usaha BUM Desa belum pernah dilakukan dan tidak ada jaminan terhadap dukungan pendampingan terhadap pengelolaan BUM Desa.

*Kedua*, Yulianus Nardin (2019) berjudul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Potensi pada Program BUM Desa. Dalam penelitian ini berfokus pada sebuah desa yakni, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Pemerintahan Desa Pesanggrahan bersama masyarakat melakukan kerja sama untuk mengelola potensi/keunggulan yang dimiliki desa guna meningkatkan pertumbuhan

ekonomi masyarakat melalui program BUM Desa. Pada pengembangan sumber daya manusia BUM Desa Pesanggrahan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat melalui unit BLK (Balai Latihan Kerja) rencana bidang sesuai dengan dokumen RPJM Pesanggrahan, Galeri batik dan Sablon yang terdiri dari prasarana pembangunan Fisik, dan pelatihan pertanian (hidroponik) yang menggunakan air dengan media paralon. pengembangan sumber daya manusia masyarakat diperdayakan secara mandiri yang kemudian pemerintah mendirikan BUM Desa sebagai wadah pengelola untuk pengembangan sumber daya manusia di desa. Pemupukan modal masyarakat yang dikembangkan desa pesanggrahan bersumber dari APDes dan swasta yaitu CSR dana sosial dari perusahaan ASTRA untuk pengelolaan sabun susu. Dan pembagian modal diberikan BUM Desa pada unit-unit pengelola, seperti unit pertanian hitroponik, unit pengelola sabun susu, unit pengelola aset dan unit pengelola keuangan UPK.

Demikian setiap unit dapat mengatur dan mengelola modal yang ada dibawah kendali atau pemantauan BUM Desa Pesanggrahan. Arah kebijakan keuangan desa, pemerintah desa memberikan modal kepada BUM Desa untuk mengelola potensi desa sesuai program yang diselenggarakan. Modal yang diberikan pemerintah digolongkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat di dalamnya ada pengelolaan Potensi Desa oleh BUM Desa. Modal ini kemudian dikembangkan oleh BUM Desa sesuai dengan rancangan yang ditetapkan untuk mengelola potensi yang ada di desa. Serta keterlibatan swasta dalam memberikan modal untuk BUM Desa Pesanggrahan sangat menguntungkan.

Pengembangan Usaha Produktif yang diselenggarakan masyarakat desa pesanggrahan meliputi sabun susu, galeri sablon, dan oleh-oleh. Bagaian usaha produktif ini dikembangkan secara bersama oleh masyarakat yang memiliki keterampilan khusus, selanjutnya BUM Desa memberikan pelatihan-pelatihan khusus pada masyarakat sesuai bidang keterampilan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pula melihat sejauh mana Desa Pesanggrahan melalui BUM Desa menerapkan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hidroponik mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hidroponik tidak terawat.

*Ketiga*, Rosi Yulawati 2017 berjudul, Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini mendapati ada potensi desa yang belum dikelola secara optimal dalam hal ini ialah tanah desa. Terdapat Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa Kawalmukti dalam pengelolaan potensi antara lain, yang pertama dihadapi oleh pemerintah desa seperti pengelolaan potensi BUM Desa kepengurusan dan penentuan program belum terealisasi dengan tepat, hambatan yang kedua pengelola BUM Desa masih belum sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh

pemerintahan desa, hambatan yang ketiga fasilitas informasi kurang memadai sehingga pencapaian dalam penyampaian informasi penyelenggaraan pengelolaan potensi masih kurang, hambatan yang keempat pengelola masih kurang mengerti dan memahami arti pentingnya pelaporan yang akuntabel, hambatan yang kelima kurangnya kesadaran pengelola membayar sewa kepada pemerintah desa sehingga menghambat pada setiap pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Hal ini dilihat dari indikator seperti 1) Masih ada potensi desa yang belum di kelola dengan optimal misalnya tanah desa (tanah titisara) yang belum dikelola secara optimal oleh Desa Kawalimukti. 2) Masih belum berfungsinya BUM DESA secara optimal di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sebagai contoh kepengurusan BUM Desa masih belum bekerja sesuai yang diharapkan, BUM Desa masih belum difasilitasi Oleh Pemerintah Desa, usaha-usaha desa masih dikelola oleh Pemerintah Desa seperti Sewa Menyewa Kios. 3) Kurangnya Pendapatan Asli Desa di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis didalam rencana tahun 2016 Rp. 126.167.762 yang terealisasi baru Rp. 78.800.000. Pada kasus ini BUM Desa juga belum difasilitasi oleh pemerintah desa dengan usaha seperti penyewaan tempat (kios) masih di kelola oleh pemerintah desa. Selain itu juga BUM Desa di Desa Kawalimukti yang belum berjalan secara optimal karena dalam kepengurusan BUM Desa tidak bekerja sesuai dengan yang di harapkan seperti dengan pelaporan yang masih belum dimengerti oleh pengurus BUM Desa.



Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti nantinya, seperti program BUM Desa serta anggaran yang digunakan untuk perkembangan usaha hingga belum optimalnya pengelolaan potensi yang dilakukan oleh BUM Desa akibat dari kapasitas pengurus BUM Desa.

Pada penelitian ini yaitu fokus mengkaji mengenai program kerja pemerintah kalurahan dan program pengembangan potensi kalurahan disertai dengan kerja sama dalam pengembangan potensi kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan Triwidadi.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemerintahan**

Menurut Syafiee (2003:22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Pemerintahan secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem atau mekanisme yang digunakan oleh sebuah negara untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya. Pemerintahan mencakup struktur, lembaga, dan proses yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas, keadilan, serta kesejahteraan bagi rakyat. Istilah ini sering merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk menjalankan fungsi negara. Pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi

kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndaraha, 2005:36).

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (2003:12), Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintahan tidak hanya mengacu pada lembaga negara, tetapi juga melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama pemerintahan adalah menetapkan kebijakan, menjaga keamanan, melindungi hak-hak warga negara, serta menyediakan pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintahan menjadi fondasi penting bagi terbentuknya masyarakat yang tertib dan harmonis.

Menurut Rasyid (2000:13) pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Maka suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.

Menurut Ndaraha (2005:57) menerangkan fungsi pemerintahan bersifat objektif dan tugas subjektif, dalam hal ini terdapat tiga fungsi pemerintahan yakni, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan. Sehingga pemerintahan mempunyai tugas untuk melayani dan mengatur masyarakat. Pelayanan yang harus mendahului kepentingan publik, memberikan kemudahan dalam urusan umum hingga memberikan kepuasan kepada masyarakat, lalu mengatur dimaksudkan pada kekuasaan pada jabatan birokrasi. Pemerintahan berfungsi untuk menjalankan berbagai tugas, seperti membuat dan menerapkan kebijakan, menjaga stabilitas, dan melayani kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintahan mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah lokal, termasuk pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan pada tingkat lokal yang berperan langsung dalam mengelola masyarakat di tingkat desa. Pemerintahan desa memiliki fungsi yang serupa dengan pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi, tetapi dengan lingkup yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Sehingga pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pemerintahan dan dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa (A.W. Widjaja 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan

perangkat desa yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan uraian diatas maka pemerintahan desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih 2002).

Namun seringkali ditemui bahwa pemerintahan baik itu pada tingkat pusat maupun desa terdapat persoalan seperti implementasi yang cenderung fokus pada kepentingan politik, pengumpulan kekuasaan, atau keuntungan pribadi dibandingkan memenuhi kebutuhan rakyat sampai pada struktur birokrasi yang berbelit sering kali menghambat masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat dan efisien. Hal tersebut merupakan permasalahan yang kerap kali di temui pada setiap daerah hingga desa di Indonesia.

Selain itu juga terdapat kebijakan yang sering kali hanya bersifat populis untuk menarik simpati masyarakat tanpa disertai langkah konkret yang berdampak nyata. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan menciptakan celah untuk penyimpangan juga merupakan tantangan yang terjadi pada pemerintahan apalagi dalam wilayah desa. Dalam hal ini pemerintah perlu mengevaluasi lagi setiap persoalan yang ada pada realita

pelaksanaan pemerintahan di masyarakat jika mau menciptakan pemerintahan yang benar-benar melayani kepentingan masyarakat.

Selain itu juga pada tingkat pemerintahan secara umum, salah satu masalah terbesar adalah birokrasi yang berbelit-belit. Prosedur administratif yang kompleks sering kali memperlambat pelayanan publik dan mengurangi efisiensi pengambilan keputusan. Misalnya, masyarakat sering menghadapi hambatan dalam mengurus dokumen penting, yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Korupsi juga menjadi masalah yang terus menghantui pemerintahan di berbagai tingkatan. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, praktik korupsi masih sering ditemukan, baik di pemerintahan pusat maupun desa. Hal ini merugikan masyarakat karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kritik lainnya. Di tingkat nasional, kebijakan sering kali dibuat tanpa melibatkan suara rakyat secara langsung, sementara di tingkat desa, musyawarah desa sering kali hanya menjadi formalitas. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, salah satu kritik utama adalah tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan sering kali tidak dilaporkan secara terbuka, sehingga menimbulkan dampak buruk

terhadap masyarakat terhadap anggaran. Transparansi yang rendah ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa menjadi hambatan dalam menjalankan tugas-tugas administratif maupun pembangunan. Banyak perangkat desa yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang mampu mengelola program pembangunan secara efektif. Pelatihan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini. Kurangnya perhatian terhadap pembangunan sosial dan budaya di tingkat pemerintahan juga menjadi kritik yang relevan. Pemerintah sering kali lebih fokus pada pembangunan fisik, sementara aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya lokal sering kali terabaikan. Padahal, pembangunan sosial adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sinergi yang buruk antara pemerintah pusat, daerah, dan desa sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Banyak desa yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan atau dukungan teknis karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tingkat pemerintahan.

Pengawasan yang lemah terhadap kinerja pemerintahan, baik nasional maupun desa, juga menjadi kritik penting. Banyak program yang gagal mencapai tujuannya karena kurangnya evaluasi dan pengawasan yang ketat. Hal ini memungkinkan terjadinya penyimpangan atau ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan,

terutama di tingkat desa, menjadi masalah besar di era digital saat ini. Teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik.

Namun, banyak desa yang belum memiliki infrastruktur atau keterampilan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Ketidakpuasan terhadap kebijakan juga menjadi masalah lainnya. Perubahan kepemimpinan sering kali diikuti oleh perubahan arah kebijakan, yang mengakibatkan program-program yang sedang berjalan terhenti di tengah jalan. Pemerintah perlu memastikan program kesinambungan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraannya, pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan mempercepat pembangunan desa itu sendiri. Sehingga pemerintahan desa dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, mengembangkan potensi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Penyelenggaraan Pemerintahan**

Menurut Djokosutono (2017:23) Penyelenggaraan pemerintahan merupakan keseluruhan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Dalam hal ini lebih menekankan pada pentingnya proses maupun kegiatan

pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus memperhatikan setiap tahapan proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif memerlukan kerja sama antara berbagai komponen pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui partisipasi dan transparansi. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa prinsip, seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Pemerintah harus memastikan bahwa aparatur negara memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian,



penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses yang kompleks yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang efektif. Pemerintah harus memahami bahwa kegiatan pemerintahan tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan menurut Miriam Budiarjo (2018:15) adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan melayani kepentingan rakyat. Sehingga dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus mengedepankan pada pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah memastikan kesejahteraan, keamanan, dan kemakmuran rakyat, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya terfokus pada kekuasaan dan otoritas, tetapi juga pada pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah harus memahami bahwa kegiatan mereka memiliki dampak langsung pada kehidupan rakyat, sehingga harus dilakukan dengan profesionalisme dan integritas.

M. Kusnardi (2019:30) mengatakan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan adalah proses pelaksanaan kekuasaan dan wewenang pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Sehingga pada penyelenggaraan pemerintahan terdapat proses pelaksanaan kekuasaan dan wewenang pemerintahan untuk mencapai tujuan negara dan melayani kepentingan rakyat. Selain itu dalam penyelenggaraan

pemerintahan tidak terlepas dari beberapa fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas keamanan, hukum, dan keadilan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan pusat memberikan panduan melalui regulasi, alokasi anggaran, dan program pembangunan yang harus dilaksanakan hingga tingkat desa. Di sisi lain, pemerintahan desa menjadi pelaksana di lapangan yang memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut efektif dan efisien (Achmad Nurmandi 2020).

Menurut HAW. Widjaja (2014) dalam *Otonomi Desa* menjelaskan pemerintahan desa merupakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 3 mengatakan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam konteks ini, Kepala Desa

bertindak sebagai pemimpin dan pengambil keputusan tertinggi di desa. Kepala Desa bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, dan memastikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan secara efektif di tingkat desa. Perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, dan unsur pelaksana teknis lainnya, membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan administratif, keuangan, dan teknis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, seperti perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam melaksanakan kewenangan ini, Pemerintahan desa harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perkembangan dan kemajuan urusan desa saat ini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang dari inisiatif demi mengendalikan urusan desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses pelaksanaan kekuasaan dan wewenang pemerintahan desa untuk mencapai tujuan desa dan melayani kepentingan masyarakat desa (Jimly Asshiddiqie 2019).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa terdapat permasalahan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak selalu berjalan sesuai harapan. Permasalahan yang seringkali ditemui ialah kesenjangan antara otonomi Desa. Otonomi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya kapasitas aparatur desa dan dominasi pengaruh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa seringkali terdapat kebergantungan terhadap arahan dari pemerintah kabupaten/kota, yang membuat pengambilan keputusan kerap kali tidak mencerminkan pada kebutuhan masyarakat desa.

Hal tersebut merupakan masalah krusial yang dominan terjadi di Indonesia sehingga pada penggunaan dana desa tak jarang tidak tepat sasaran di karenakan kepala desa tidak memahami prioritas pembangunan. Selain itu juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, khususnya pada pengelolaan dana desa, seperti kurangnya pengawasan yang memadai sehingga membuka peluang terjadi kasus penyimpangan pada dana desa. Penyimpangan ini dalam bentuk pengelolaan yang tidak efisien hingga sampai pada korupsi. Sehingga laporan penggunaan anggaran desa seringkali tidak terbuka dipublikasikan kepada masyarakat desa. Apalagi dengan mekanisme pengawasan dari masyarakat yang lemah dikarenakan minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka maka akan lebih membuka peluang terjadinya penyimpangan pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa merupakan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya. Banyak perangkat desa yang kurang memiliki pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam tata kelola pemerintahan. Akibatnya, mereka sering kesulitan menjalankan tugas administratif, mengelola anggaran, atau merencanakan pembangunan desa secara efektif. Pengelolaan dana desa sering kali menjadi sorotan. Meski dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak jarang ditemukan kasus penyalahgunaan anggaran atau ketidaktransparanan dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Birokrasi yang berbelit-belit juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Proses administratif yang panjang dan rumit sering kali memperlambat pelaksanaan program atau proyek yang telah direncanakan. Ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi kritik yang sering muncul. Pemerintah desa kadang-kadang mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat, padahal mereka adalah pihak yang paling terdampak. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah desa dan warga yang seharusnya dilayani. Perencanaan pembangunan desa sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Sebagian pemerintah desa lebih mengutamakan proyek-proyek yang menarik perhatian atau hanya untuk

memenuhi target formal, tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Masalah akuntabilitas juga menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan keuangan atau hasil pelaksanaan program desa sering kali tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Akibatnya, masyarakat sulit menilai apakah anggaran digunakan dengan benar dan efisien. Konflik kepentingan di antara perangkat desa adalah masalah lain yang menghambat pemerintahan desa. Ketika kepala desa atau perangkat lainnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tujuan pemerintahan desa untuk melayani masyarakat secara keseluruhan menjadi terganggu. Lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi kritik terhadap pemerintahan desa. Banyak desa yang merasa kesulitan mengakses bantuan atau dukungan dari pemerintah kabupaten atau provinsi karena kurangnya komunikasi yang efektif. Hal ini membuat desa sulit berkembang meskipun memiliki potensi besar.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi masalah yang semakin relevan di era digital. Banyak desa yang belum memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi atau memberikan layanan publik yang lebih baik. Padahal, teknologi dapat membantu mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi. Pelestarian nilai-nilai lokal sering kali terabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa sering kali terlalu fokus pada pembangunan fisik, sehingga kurang memberikan perhatian

pada pelestarian budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang menjadi identitas desa.

Sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses pelaksanaan kekuasaan dan wewenang pemerintahan desa untuk mencapai tujuan desa dan melayani kepentingan masyarakat desa dengan menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada kegiatan pemerintahan desa secara partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan desa dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat desa, dan lembaga desa.

### **3. Potensi Desa**

Menurut Ahmad Soleh (2017:32) menerangkan bahwa potensi desa merupakan kekuatan, daya, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa merupakan kekayaan alam, budaya dan sumber daya manusia yang ada atau terdapat dalam sebuah daerah (Endah 2020:6)

Potensi desa juga dapat diartikan sebagai keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah desa, baik berupa sumber daya alam, manusia, budaya, maupun sosial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi ini menjadi modal penting bagi pembangunan desa, khususnya dalam upaya mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan. Setiap desa memiliki potensi yang unik

sesuai dengan karakteristik lokalnya, seperti kondisi geografis, tradisi, dan sumber daya yang ada. Secara umum potensi desa terbagi menjadi dua yaitu, potensi berupa iklim, binatang ternak, air, tanah, geografis, dan sumber daya manusia. Lalu terdapat potensi non fisik seperti masyarakat dengan corak interaksinya, aparatur/pamong desa, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial dan organisasi sosial desa (Icuk R. Bawono dan Erwin Setyadi 2019:8)

Potensi desa dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik mencakup sumber daya alam, seperti tanah, air, hasil pertanian, hasil peternakan, perikanan, hingga sumber daya tambang dan mineral. Misalnya, desa yang memiliki lahan subur dapat mengembangkan sektor pertanian sebagai basis perekonomian desa. Sumber daya alam ini menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat desa. Sedangkan, potensi non-fisik mencakup sumber daya manusia, kearifan lokal, budaya, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Misalnya, tradisi dan seni budaya khas desa dapat menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, lembaga-lembaga sosial seperti organisasi masyarakat, kelompok tani, atau lembaga adat juga merupakan potensi penting dalam menjaga harmoni sosial dan mendukung pembangunan desa. Potensi desa adalah kemampuan, kekuatan, atau sumber daya (fisik dan non-fisik) yang dimiliki oleh suatu daerah namun belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi ini



terbingkai dalam suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat dan tradisi setempat serta mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri (Yeto Prayitno 2015).

Pemanfaatan potensi desa membutuhkan pendekatan yang terencana dan terintegrasi. Proses ini melibatkan identifikasi potensi yang dimiliki, perencanaan strategis, pelaksanaan program pengembangan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Pemerintah desa bersama masyarakat harus mampu bekerja sama untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya desa secara maksimal tanpa merusak ekosistem dan lingkungan. Peran teknologi dalam mengembangkan potensi desa menjadi semakin penting di era digital. Teknologi informasi, seperti internet dan platform digital, dapat digunakan untuk mempromosikan produk-produk desa, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan. Sebagai contoh, produk kerajinan atau hasil bumi desa dan segala usaha dapat dipasarkan melalui platform e-commerce, sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Di samping itu, pengembangan potensi desa juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. BUM Desa berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial, dan sebagai lembaga komersial yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (Izzah & Kolopaking 2020). Oleh karena itu BUM Desa memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi

alternatif bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya lokal secara kolektif dan profesional. Partisipasi aktif dari masyarakat desa juga merupakan kunci utama dalam pengembangan potensi desa.

Potensi desa memiliki nilai tawar yang menguntungkan jika itu dapat dikelola secara baik dan memiliki sifat gradual. Namun potensi desa sering kali belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan akses pasar. Banyak desa memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi pengelolaannya masih bersifat tradisional dan tidak berorientasi pada keberlanjutan.

Banyak desa yang memiliki kekayaan alam seperti hasil pertanian, perikanan, atau pariwisata yang potensial, namun tidak terdokumentasi dengan baik. Tanpa data yang jelas, sulit bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk merencanakan pengembangan strateginya. Misalnya, banyak desa wisata yang gagal berkembang karena tidak memiliki visi jangka panjang yang didukung oleh data dan analisis. Minimnya pendidikan dan pelatihan masyarakat desa menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi desa. Banyak masyarakat desa yang masih kurang memahami cara meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang mereka miliki. Misalnya, hasil pertanian sering kali dijual dalam bentuk mentah tanpa melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan nilai ekonominya. Pelatihan keterampilan dan

pendidikan kewirausahaan perlu diberikan agar masyarakat lebih mandiri dan kreatif.

Akses terhadap teknologi modern sering kali menjadi masalah utama. Teknologi memiliki peran penting dalam pengelolaan potensi desa, terutama di era digital seperti sekarang. Namun, banyak desa yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi. Misalnya, koneksi internet yang buruk menjadi penghambat bagi desa-desa yang ingin memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Birokrasi yang rumit juga menjadi terhadat pengelolaan potensi desa. Banyak program bantuan atau pendanaan yang tersedia, namun sulit diakses oleh masyarakat desa karena persyaratan administratif yang kompleks.

Akibatnya, desa tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan infrastruktur atau mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Berkurangnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal juga menjadi masalah. Dalam banyak kasus, pengembangan potensi desa hanya dilakukan oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak lain, sehingga hasilnya kurang optimal. Padahal, kerja sama antara berbagai pihak dapat memberikan dampak yang lebih besar melalui pembagian tugas dan sumber daya yang lebih efisien.

Menariknya, permasalahan lingkungan sering kali diabaikan dalam pengelolaan potensi desa. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan dapat merusak lingkungan dan

mengurangi potensi jangka panjang desa. Misalnya, penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam pertanian dapat merusak kualitas tanah dan udara, yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

Ketergantungan pada bantuan dari luar menjadi persoalan lainnya. Banyak desa yang hanya mengandalkan program pemerintah atau lembaga donor untuk mengembangkan potensi mereka tanpa inisiatif lokal yang kuat. Padahal, pemberdayaan masyarakat setempat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan desa yang kurang transparan sering menjadi masalah dalam mengembangkan potensi desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkadang tidak digunakan secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih baik serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Potensi budaya dan tradisi sering kali diabaikan. Padahal, budaya dan tradisi lokal adalah aset penting yang dapat menjadi daya tarik pariwisata sekaligus menjaga identitas desa. Namun, kurangnya perhatian terhadap pelestarian budaya membuat banyak tradisi mulai ditinggalkan oleh generasi muda.

Kesenjangan antara desa dan kota dalam hal fasilitas dan akses masih menjadi tantangan besar. Desa yang memiliki potensi besar sering kali tidak dapat bersaing dengan kota karena kurangnya fasilitas seperti jalan yang memadai, listrik, dan air bersih. Oleh karena itu, infrastruktur investasi harus menjadi prioritas untuk membuka akses bagi desa-desa yang potensial. Minimnya kolaborasi antara pemerintah

dan masyarakat yang membuat pengembangan potensi desa seringkali terhambat dan pelaksanaan program-program tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini terjadi ketika dalam pengembangan potensi desa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Sehingga dalam perencanaan sampai pada pelaksanaannya bukan lagi sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat akibat dari tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan.

Secara keseluruhan, potensi desa adalah aset berharga yang harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan peran serta masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat, desa dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi tantangan pembangunan dengan solusi yang berakar pada kearifan lokal.

Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, desa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warganya, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengembangan potensi desa harus menjadi prioritas dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran.

#### **4. Kerja Sama**

Kerja sama adalah bentuk proses sosial, yang didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang di tunjukan untuk mencapai tujuan bersama secara saling membantu dan saling memahami aktivitas

masing-masing. Kerja sama biasanya melibatkan pembagian tugas, yang mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang sudah dipertanggungjawabkan demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Lewis Thomas & Elaine B. Johnson (2014:164) menjelaskan bahwa kerja sama merupakan pengelompokan yang terjadi diantara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal, dengan artian sebagai proses berkelompok atau beregu dimana setiap anggota saling mendukung dan mengandalkan agar mencapai hasil mufakat. Kerja sama bukan hanya terjadi di antara manusia, tetapi juga merupakan fenomena universal di antara makhluk hidup. Dalam hal ini bahwa kerja sama muncul dari kebutuhan untuk bertahan hidup dan berkembang. Dalam konteks manusia, kerja sama mencakup hubungan saling bergantung di mana individu atau kelompok berbagi sumber daya, informasi, dan tanggung jawab. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kondisi eksternal yang mendorong adanya sinergi.

Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan bersama yang dilakukan individu atau kelompok dengan saling berbagi peran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama (Zainudin 2019). Kerja sama melibatkan pembagian tugas yang jelas di mana setiap pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Proses ini dilandasi oleh rasa saling percaya yang memungkinkan individu atau kelompok bekerja secara efektif tanpa rasa curiga. Hal ini penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif di

berbagai konteks, termasuk dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa mengesampingkan pengawasan dan evaluasi dalam menjaga kelangsungan kerja sama.

Menurut Johnson & Johnson (2015) kerja sama adalah situasi di mana individu saling bergantung secara positif untuk mencapai tujuan bersama, dengan keberhasilan satu pihak turut menentukan keberhasilan pihak lain. Keberhasilan sebuah tim atau kelompok bergantung pada sejauh mana semua anggotanya bekerja sama. Pentingnya pembagian tanggung jawab yang adil untuk memastikan semua pihak merasa dihargai. Dengan cara ini, kerja sama tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mempererat hubungan antar individu. Dalam sebuah kerja sama konflik merupakan bagian yang sulit dihindari. Namun, jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan kinerja. Pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah dapat menjaga keberlanjutan kerja sama.

Abu Ahmadi (2016) memandang kerja sama adalah usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kerja sama sebagai elemen mendasar dalam interaksi sosial manusia. Sehingga kerja sama muncul dari kebutuhan kolektif untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat diraih secara individu.

Dalam kerja sama, setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga efisiensi dan efektivitas dapat tercapai. Kerja sama

menurut Abdulsyani (2018) adalah suatu bentuk proses sosial di mana terdapat aktivitas tertentu yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Proses sosial ini yang melibatkan aktivitas bersama dengan tujuan yang jelas. Jadi kerja sama harus dimulai dari kesepakatan awal di mana semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini menjadi penting untuk menghindari konflik atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kerja sama.

Salah satu masalah utama yang terjadi pada kerja sama ini adalah komunikasi yang buruk. Banyak tim atau kelompok yang gagal mencapai tujuan karena kurangnya komunikasi yang terbuka dan jelas. Misalnya, anggota tim sering kali tidak memahami peran atau tanggung jawab mereka karena informasi yang disampaikan tidak merata. Akibatnya, muncul kebingungan yang menghambat kelancaran kerja sama. Ego individu juga sering menjadi penghalang dalam kerja sama. Dalam situasi tertentu, anggota kelompok lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

Hal ini sering menyebabkan konflik internal yang merusak dinamika tim. Tanpa komitmen untuk menempatkan tujuan bersama di atas ambisi individu, kerja sama sulit berjalan dengan baik. Pendistribusian tanggung jawab yang tidak merata juga menjadi masalah dalam kerja sama. Ketika sebagian anggota tim harus menanggung beban kerja yang lebih besar sementara yang lain kurang berkontribusi, rasa kekecewaan dan ketidakadilan dapat muncul. Kekacauan ini sering kali memicu konflik dan menurunkan



produktivitas tim secara keseluruhan. Berkurangnya kepercayaan antar anggota adalah salah satu hambatan utama dalam kerja sama. Tanpa rasa saling percaya, sulit bagi anggota tim untuk berbagi ide, pendapat, atau kritik secara jujur. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan kemiskinan, sehingga menghambat inovasi dan kolaborasi. Tujuan yang tidak jelas atau tidak disepakati bersama sering kali membuat kerja sama menjadi tidak efektif. Jika anggota tim tidak memahami atau tidak setuju dengan tujuan yang ingin dicapai, mereka akan bekerja dengan arah yang berbeda-beda. Akibatnya, energi dan sumber daya terbuang percuma tanpa hasil yang optimal.

Budaya kerja yang tidak inklusif juga menjadi kritik yang sering ditemui dalam membangun kerja sama. Ketika anggota kelompok tertentu merasa diabaikan atau tidak puas, mereka cenderung menarik diri dari proses kerja yang sama. Hal ini sering terjadi dalam tim yang kurang memperhatikan keberagaman dan inklusi, baik dari latar belakang, pengalaman, maupun sudut pandang. Kependekan dalam pendekatan kerja yang sama juga menjadi masalah. Ketika tim terlalu kaku dalam cara mereka bekerja, mereka sulit beradaptasi terhadap perubahan atau tantangan baru. Kerja sama yang efektif memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang dinamis. Pengambilan keputusan yang lambat sering kali menjadi hambatan dalam kerja sama.

Dalam beberapa kasus, diskusi yang terlalu panjang atau keengganan untuk mengambil risiko dapat menunda waktu kemajuan.

Keputusan yang cepat dan tepat adalah elemen penting dalam memastikan kerja sama berjalan dengan lancar. Kurang apresiasi terhadap kontribusi individu dalam kerja sama juga perlu dikritisi. Ketika usaha atau pencapaian anggota tim tidak dihargai, motivasi mereka untuk berkontribusi lebih lanjut akan menurun. Pengakuan atas kontribusi individu sangat penting untuk menjaga semangat kerja sama. Kerja sama sering kali terhambat oleh kurangnya evaluasi dan refleksi. Banyak tim yang tidak meluangkan waktu untuk menilai apa yang telah berhasil atau gagal dalam pekerjaan sama mereka. Tanpa evaluasi, sulit untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan cara kerja di masa depan.

Sehingga dalam hal ini kerja sama merujuk pada hubungan kolaboratif antara berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lain, untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan pelayanan publik, pembangunan, atau pengelolaan sumber daya bersama. Kerja sama dalam konteks ini sering kali dilandasi oleh prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan berbasis hukum atau kesepakatan formal.

## **5. Program**

Menurut Munthe (2015) bahwa program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan seksama dan terjadi proses kegiatan yang terus berkesinambungan dan melibatkan banyak orang. Program bukanlah kegiatan tunggal atau

insidentil, melainkan rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan. Program ini dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memerlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, dan pengawasan yang ketat.

Menurut Donald B. Y dalam Ashiong P. M (2015) diartikan program sebagai aplikasi sistematis dari sumber daya yang di dasarkan pada logika, keyakinan, dan asumsi identifikasi kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Program juga disebut sebagai hal yang termasuk di dalamnya serangkaian kegiatan sistematis yang direncanakan, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan yang spesifik, diidentifikasi, adanya partisipasi individu atau kelompok, adanya konteks tertentu, menghasilkan output terdokumentasi, hasil, dan dampak, adanya sistem keyakinan yang terimplementasi dengan program kerja, dan memiliki manfaat.

Lebih lanjut Arikunto dan Jabar dalam A. Munthe (2015) Program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Dalam arti khusus program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam hal ini terdapat tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu 1) realisasi atau implementasi suatu

kebijakan, 2) terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Program diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dapat disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Tayibnapis dalam Ashiong P. M (2015) mengatakan Program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Program sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang (Widoyoko 2015).

Menurut Eko Prasajo (2018) mengartikan program adalah rangkaian kegiatan yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, program merupakan serangkaian aktivitas yang sistematis, terkoordinasi dan terarah pada pencapaian tujuan yang jelas dan spesifik. Program dimulai dengan perencanaan matang, mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya, waktu dan biaya. Hal ini memastikan pelaksanaan program efektif dan efisien. Pada pelaksanaannya, program melibatkan beberapa tahapan penting, seperti perencanaan yang menentukan tujuan, sasaran dan strategi lalu pengorganisasian yang mengalokasikan sumber daya dan membagi tugas, selanjutnya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, hingga pada

pengawasan untuk memantau kemajuan dan mengoreksi kesalahan, lalu selanjutnya evaluasi untuk menilai hasil dan mengidentifikasi perbaikan.

Maka dengan melaksanakan program secara sistematis, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mencapai tujuan yang jelas, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas dan produktivitas, serta membangun kepercayaan dan kerjasama tim. Maka secara sederhana program diartikan sebagai rangkaian usaha atau kegiatan dan proyek yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (R. D. Hastuti 2018).

Program, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi, maupun lembaga lainnya, pastinya akan memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat atau memenuhi kebutuhan tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, program-program ini sering kali menghadapi berbagai masalah yang menimbulkan kritik. Maka dalam melihat beberapa kelemahan dari implementasi program penting dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik.

Masalah yang seringkali muncul adalah berkurangnya pemetaan kebutuhan yang mendalam sebelum program diluncurkan. Banyak program yang dirancang tanpa memahami kondisi, kebutuhan, atau tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan program tersebut tidak relevan atau bahkan tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Sering kali terjadi ketidakjelasan dalam tujuan program. Program yang tidak memiliki

sasaran yang spesifik dan diukur sulit diukur keberhasilannya. Akibatnya, sumber daya yang digunakan menjadi terbuang percuma karena tidak ada parameter yang jelas untuk menyalurkan dampaknya.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam program perencanaan menjadi kritik berikutnya. Banyak program yang dirancang secara top-down tanpa melibatkan masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat. Hal ini membuat masyarakat merasa program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tingkat partisipasi dan keberhasilan program menjadi rendah.

Kelemahan dalam komunikasi antar pihak yang terlibat juga sering kali menjadi penghalang keberhasilan program. Kurangnya koordinasi antara penyelenggara program, pemerintah, dan masyarakat membuat pelaksanaannya menjadi tidak sinkron. Misalnya, jadwal kegiatan yang tidak disampaikan dengan baik dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Penerapan yang tidak konsisten menjadi kritik lainnya. Dalam banyak kasus, program yang telah dirancang dengan baik tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, kegiatan-kegiatan dalam program sering ditunda atau bahkan dibatalkan tanpa alasan yang jelas, sehingga target yang ingin dicapai tidak terpenuhi.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sering kali menimbulkan kerusakan. Dalam program yang melibatkan dana besar, ketidakjelasan dalam alokasi anggaran dapat menimbulkan persepsi negatif tentang penyaluran dana. Transparansi anggaran

adalah elemen penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Pengawasan dan evaluasi yang lemah juga menjadi kritik utama. Banyak program yang tidak membahasnya secara ketat atau dievaluasi secara menyeluruh, sehingga masalah yang muncul selama pelaksanaan tidak dapat segera diatasi. Evaluasi yang buruk juga membuat program sulit diperbaiki di masa mendatang.

Kurang pelatihan atau pendampingan bagi pelaksana program menjadi hambatan lain. Program yang dirancang dengan baik membutuhkan tenaga pelaksana yang terampil dan memahami tujuan program. Namun banyak program yang gagal karena pelaksananya tidak memiliki kompetensi yang memadai. Keterbatasan waktu pelaksanaan sering kali menjadi kritik. Program yang bersifat jangka pendek cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan, terutama jika menyangkut perubahan perilaku atau pembangunan infrastruktur.

Program ini membutuhkan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Program-program sering kali tidak mempertimbangkan keberagaman dalam masyarakat. Misalnya, program yang dirancang untuk satu kelompok tertentu tidak relevan bagi kelompok lainnya, sehingga dampaknya menjadi tidak merata. Peranan program harus lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Ketergantungan pada bantuan eksternal menjadi masalah lain dalam banyak program. Ketika pendanaan atau dukungan teknis dari pihak luar berhenti, program sering kali tidak dapat dilanjutkan.

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam perancangan program.

Banyak program yang kurang memperhatikan lingkungan yang tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan justru merusak ekosistem lokal. Misalnya, proyek pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dapat menyebabkan masalah jangka panjang bagi masyarakat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, penting bagi penyelenggara untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Langkah ini dapat dimulai dengan mengadakan forum evaluasi yang melibatkan semua pihak terkait. Selain itu, dengan memperkuat pengawasan yang intens dapat menjadi potensi yang besar untuk memberikan dampak yang lebih luas jika kelemahan-kelemahan yang ada dapat diperbaiki. Dengan pembenahan pada tahap perencanaan, pengawasan, dan pelibatan masyarakat secara lebih merata, program ini diharapkan dapat menjadi model yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana atau terstruktur dengan sistematis yang akan diimplementasikan pada kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam organisasi dan melibatkan banyak partisipan di dalamnya dengan menghadirkan pengawasan yang intens disetiap kegiatan.



## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode kerja peneliti dengan menggunakan cara mendeskripsikan subjek serta objek berlandaskan fakta-fakta yang faktual yang terjadi saat ini (Prastowo 2011;189). Cara kerja deskriptif dengan dilakukan secara terus menerus terhadap objek penelitian merupakan metode deskriptif, yang dapat diartikan seperti tindakan investigasi yang berupaya menjangkau secara interval informasi ilmiah.

Ulfatin (2015;25) menyatakan, bahwa semua jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif, bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang karakteristik untuk fenomena yang akan diteliti. Ciri dari metode ini salah satunya, yakni bersifat naratif dan akan menjawab pertanyaan terkait *how*, *why* dan *what* yang umumnya akan di gunakan. Dalam hal ini dapat berguna untuk menggali data yang kompleks dan mendalam untuk memahami fenomena yang diteliti secara holistik.

Adapun dalam hal ini, penelitian kualitatif deskriptif bermaksud untuk mengungkapkan serta mengekspos kondisi dan fakta yang ada di lapangan secara terperinci dan mendetail mengenai permasalahan yang akan diteliti. Maka, lewat penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti hendak melakukan kajian komprehensif

mengenai bagaimana penyelenggaraan pemerintahan kalurahan Triwidadi dalam pengelolaan potensi melalui BUM Kal.

## **2. Objek dan Subjek Penelitian**

### **a. Objek penelitian**

Objek penelitian pada penelitian kualitatif, menurut Spradley dalam (Sugiyono 2015) dinamakan situasi sosial dengan tiga komponen diantaranya pelaku (*actor*), aktivitas (*activities*) dan tempat (*place*).

Dalam hal ini objek penelitian merupakan situasi yang mencitrakan suatu keadaan tentang objek yang akan di teliti. Objek ini dapat berupa situasi, kondisi, perilaku, proses atau fenomena alam dan sosial yang ingin dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Objek penelitian yang jelas, spesifik dan terdefinisi dengan baik dapat memudahkan peneliti untuk fokus pada aspek-aspek penting yang ingin diteliti.

Objek penelitian yang jelas juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan penelitian yang tepat dan merancang metode penelitian yang efektif. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah kalurahan Triwidadi dalam pengelolaan potensi.

### **b. Subjek penelitian**

Subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang akan memberikan informasi mengenai kondisi serta

situasi atas domain atau objek yang akan di teliti. Subjek penelitian memberikan informasi, data dan wawasan yang akurat dan relevan tentang objek penelitian.

Mereka dapat berupa informan kunci seperti ahli atau pakar, narasumber dengan pengalaman langsung atau partisipan yang terlibat dalam proses penelitian. Oleh karena itu peneliti harus memastikan bahwa subjek memiliki relevansi dengan objek penelitian, kemampuan memberikan informasi akurat dan ketersediaan waktu untuk berpartisipasi. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan kredibilitas dan kepercayaan subjek.

Proses seleksi subjek penelitian dimulai dengan identifikasi potensial subjek, evaluasi kriteria pemilihan dan kontak awal untuk menjelaskan tujuan penelitian. Setelah memperoleh persetujuan dan kesediaan berpartisipasi, peneliti harus membangun hubungan profesional dengan subjek. Dengan memilih subjek penelitian yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas penelitian.

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive, yakni informan ditentukan berdasarkan atas kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian.

Tabel 1. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan/Profesi
1.	Slamet Riyanto	L	SLTA	Lurah
2.	Anita Yulia Fatmawati, Amd. Kl.	P	D3	Carik
3.	Mulyadi	L	SLTA	Ulu-Ulu
4.	Ruswanto	L	SLTA	Ketua Bamuskal
5.	Eko Setiawan	L	SLTA	Direktur BUM Kal Triwidadi
6.	Rifai Yusuf	L	SLTA	Anggota BUM Kal Triwidadi
7.	Edi Irwanto	L	SLTA	Anggota BUM Kal Triwidadi
8.	Rizki Agus Prayitno	L	S1	Warga masyarakat
9.	Subiyana	L	SLTA	Warga masyarakat

*Sumber : Dokumen Peneliti 2025*

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya menjangkau berbagai informasi, fenomena maupun kondisi di lokasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan aktivitas pengumpulan data dengan cara langsung mengamati situasi dan kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2017) observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu-individu dengan melakukan pencatatan baik secara terstruktur maupun semistruktur (mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui).

Lalu menurut Supriyati (2011) observasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan konteks naturalistik sehingga menimbulkan interaksi yang wajar dari pelakunya. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat, relevan dan dapat diandalkan tentang perilaku, proses dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti dan mengidentifikasi pola, tema dan hubungan. dengan

memperhatikan berbagai aspek seperti kondisi lingkungan, perilaku individu, interaksi sosial dan proses yang berlangsung. Catatan lapangan yang rinci dan sistematis sangat penting untuk memastikan keakuratan data. Dalam konteks ini tujuan observasi yakni, mengamati dan mencari tahu dengan mengumpulkan fakta tentang fenomena yang terjadi dilapangan.

Dalam hal ini peneliti menemukan fenomena mengenai proses pengelolaan potensi atau sumber daya oleh Badan Usaha Milik kalurahan Triwidadi sehingga boleh mendatangkan pendapatan baik itu bagi kalurahan maupun bagi masyarakat kalurahan.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab, sehingga memunculkan jawaban yang dapat dikonstruksikan dalam makna untuk suatu topik tertentu (Sugiyono 2017).

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan cara percakapan yang terstruktur yang dimana pewawancara bertanya beberapa pertanyaan, lalu narasumber menjawab. Biasanya dalam mengajukan pertanyaan oleh pewawancara akan ditanggapi oleh individu yang diwawancarai dengan

memberikan informasi. Pewawancara perlu memiliki keterampilan komunikasi efektif, mendengarkan aktif dan fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan tambahan. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, pewawancara harus menghormati privasi dan kepercayaan narasumber untuk membangun hubungan yang baik.

Wawancara memiliki kelebihan seperti memperoleh informasi mendalam, mengumpulkan data yang akurat dan relevan serta membangun hubungan dengan narasumber. Namun, wawancara juga memiliki keterbatasan seperti waktu dan biaya yang diperlukan, ketergantungan pada kemampuan pewawancara dan potensi bias dalam pengumpulan data.

Pada konteks ini wawancara merupakan sebuah aktivitas untuk mencari informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang sesuatu yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mewawancarai beberapa informan tentang bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Triwidadi dalam pengelolaan potensi oleh Badan Usaha Milik Kalurahan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari variabel atau data tentang hal-hal yang berupa transkrip, majalah, agenda, catatan, surat

kabar, notulen rapat, buku dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto (2014).

Dalam konteks ini dokumentasi merupakan pengambilan data dengan bukti otentik dengan menggunakan sarana yang ada untuk mengambil data yang diperlukan bagi peneliti. Peneliti akan menghimpun dokumen-dokumen yang menunjang penelitian, diantaranya yakni Profil Kalurahan Triwidadi, meliputi sejarah, geografis, demografi dan sosial-ekonomi. Visi dan misi Lurah Triwidadi sebagai landasan pengembangan desa. Struktur organisasi dan tata kerja Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal). Rekaman wawancara dengan pemerintah kalurahan, pemangku kepentingan dan narasumber lainnya. Catatan hasil penelitian lapangan, termasuk observasi dan survei. Monografi Kalurahan Triwidadi, berisi data statistik dan informasi tentang desa. Arsip Kalurahan, seperti peraturan desa, keputusan Lurah dan dokumen resmi lainnya. Dokumen-dokumen resmi pemerintah terkait, seperti peraturan daerah dan kebijakan pemerintah. Laporan kegiatan pengembangan desa dan evaluasi program serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah prosedur mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil



wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah temuannya dipahami (Sugiyono 2017).

Meminjam Miles dan Huberman (2014) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas. Adapun menurut keduanya, dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang datang dari catatan-catatan di lapangan. Meminjam sugiyono (2017) menerangkan bahwa dalam mereduksi data berarti memilih hal-hal pokok, merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal penting.

Maka dengan data yang di reduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dengan data yang terhimpun dan terekam saat di lapangan selanjutnya akan di rangkum sesuai dengan kebutuhan. Dengan mereduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema dan hubungan antar variabel dengan lebih mudah.

Reduksi data ini juga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data tambahan yang diperlukan, serta memudahkan pencarian data saat diperlukan. Dengan demikian, proses analisis data menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman 2014). Tujuannya adalah menggabungkan informasi-informasi sehingga dapat menggambarkan suatu keadaan yang terjadi.

Penyajian data yang sistematis dan terstruktur memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Hal ini pada akhirnya dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Dalam konteks penelitian, penyajian data yang baik merupakan kunci untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. sehingga, penyajian data harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian.

Oleh karena itu penyajian data merupakan hasil dari reduksi data yang di sediakan dalam bentuk yang sistematis agar mudah di pahami secara keseluruhan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan berarti proses merumuskan makna dari hasil penelitian yang di dapatkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami.

Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, untuk mengidentifikasi temuan utama, pola, dan hubungan antar variabel. Penarikan kesimpulan yang tepat memungkinkan peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitian secara efektif kepada berbagai pihak.

Kesimpulan yang diambil harus akurat, relevan, dan konsisten dengan data yang ada. Peneliti harus memastikan bahwa kesimpulan tersebut tidak bias atau menyesatkan, serta dapat diuji dan diverifikasi lebih lanjut.

Oleh karena itu penarikan kesimpulan ini merupakan informasi yang di sajikan dalam proses penelitian dengan di tempatkan pada bagian penutup tepatnya bagian kesimpulan menggunakan data yang sudah disusun dan disederhanakan agar dapat dengan mudah di pahami.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN TRIWIDADI**

#### **A. Sejarah Kalurahan Triwidadi**

Kalurahan Triwidadi berdiri pada tanggal 19 Oktober 1946 kurang lebih tiga belas bulan setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno –Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII memberikan maklumat pada 5 September 1945 yang berisi pernyataan bahwa wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Dalam Perkembangannya juga dilakukan penataan di Organisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai di tingkat kalurahan Pembentukan Dewan Kalurahan dan Penggabungan Kalurahan.

Kalurahan Triwidadi merupakan penggabungan Tiga Kalurahan yang terdiri dari Kalurahan Kersan, Trucuk dan Sokodadi. Kalurahan Kersan Terdiri dari 11 Pedukuhan, Kalurahan Trucuk terdiri dari 5 Pedukuhan dan kalurahan Sokodadi terdiri dari enam Padukuhan melalui musyawarah Para tokoh pada masa itu memilih yang memmimpin kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah dengan pertimbangan dari para tokoh pada waktu yang bisa menulis latin karena pada masa itu belum banyak tokoh yang bisa menulis latin karena sebagian besar para tokoh pada masa itu biasa menulis dengan aksara jawa selanjutnya di pilih Bapak Harjo Soetomo sebagai Lurah di Kalurahan Triwidadi serta selanjutnya

dilakukan pemilihan Aparatur Kalurahan seperti Carik, Jogoboyo, Kemakmuran, Kamituwo, dan lain sebagainya.

Bapak Harjo Soetomo Menjabat Lurah Kalurahan Triwidadi mulai Tahun 1946 s/d 1988 selanjut setelah purna tugas Bapak Harjo Soetomo dilaksanakan pemilihan Lurah di kalurahan Triwidadi. Pemilihan Kepala Desa di Desa Triwidadi dilaksnakan pada tahun 1989 yang diikuti oleh 8 (delapan) calon kepala desa dan yang terpilih adalah Bapak Mardiyono dari Dusun Kalisoko. Bapak Mardiyono menjabat sebagai Kepala Desa Triwidadi mulai tahun 1990 s/d 1998. Saat terjadi kekeosongan Jabatan Kepala Desa pemerintah Desa Triwidadi diisi Oleh Penjabat Kepala Desa dan pada tahun 1999 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 96 yang mengamanatkan Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pada Pemilihan Kepala Desa Triwidadi pada tahun 1999 Bapak Mardiyono kembali terpilih menjadi Kepala Desa Triwidadi masa jabatan 1999 s/d 2008. Sebelum berakhirnya Masa jabatan Bapak Mardiyono dilaksanakan Pemilihan Lurah pada tahun 2008 yang diikuti oleh 3 calon Lurah. Pada Pelaksanaan pemilihan Lurah Kalurahan, Slamet Riyanto menjadi calon Lurah Kalurahan terpilih dan dilantik pada tanggal 30 Maret 2008 untuk menjabat Lurah Kalurahan Triwidadi Masa Periode 2008 s/d 2014. Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan pada Tanggal 23 Desember 2013 yang diikuti satu calon Lurah Desa yaitu Slamet Riyanto dan Slamet Riyanto kembali menjadi Lurah Kalurahan Triwidadi terpilih untuk masa Jabatan 2014 s/d 2020 dilantik pada Tanggal 30

Maret 2014. Dengan berakhirnya masa jabatan Slamet Riyanto sebagai Lurah Desa masa periode 2014 s/d 2020 di selenggarakan Pemilihan Lurah yang pada awalnya akan diselenggarakan pada 21 Juni 2020 namun karena kondisi adanya suatu bencana wabah Covid 19 pelaksanaan Lurah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 yang diikuti 2 ( dua) calon Lurah.

Pada Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2020 Slamet Riyanto menjadi Calon Lurah Triwidadi terpilih untuk masa jabatan Lurah 2021 s/d 2026. Sejak awal berdiri sampai dengan sekarang kalurahan Triwidadi telah di pimpin oleh 3 orang Lurah/Kepala Desa dengan telah melaksanakan 6 (enam) kali pemilihan Lurah/Kepala desa :

1. Harjo Soetomo di tahun 1946 s/d 1988
2. Mardiyono di tahun 1990 s/d 2008
3. Slamet Riyanto di tahun 2008 s/d 2026

Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan Triwidadi pertama kali berpusat di kediaman bapak Harjo Soetomo tepatnya di padukuhan Pajangan selanjutnya pada saat itu Bapak Harjo Soetomo Membeli Tanah milik Bapak Kromo yang terletak di pedukuhan Pajangan hasil pembelian tanah tersebut selanjutnya di tukar guling dengan tanah kas Desa yang ada dipedukuhan ngincep. Tanah hasil tukar guling yang terletak di pedukuhan pajangang tersebut selanjutnya digunakan untuk kantor kelurahan triwidadi dan bangunan pertama kali kantor adalah Rumah joglo yang dibeli oleh pemerintah kalurahan dari warga di daerah Wonotawang Bangunjiwo. Rumah Joglo yang digunakan untuk kantor kalurahan adalah joglo yang sampai saat ini masih berdiri walupun pernah mengalami perbaikan perbaikan pada konstruksinya.

## **B. Visi Misi Kalurahan Triwidadi**

### **a. Visi**

Visi merupakan penjabaran tujuan jangka panjang yang ingin di capai oleh komunitas, organisasi dan lembaga. Visi kalurahan Triwidadi 2021 s/d 2026 adalah : “Mewujudkan Triwidadi SMART ; Sejahtera, Mandiri, Aman, Religius, Tangguh”

### **b. Misi**

Misi merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi yang telah di jabarkan sebelumnya. Oleh karena itu misi kalurahan Triwidadi 2021 s/d 2026 :

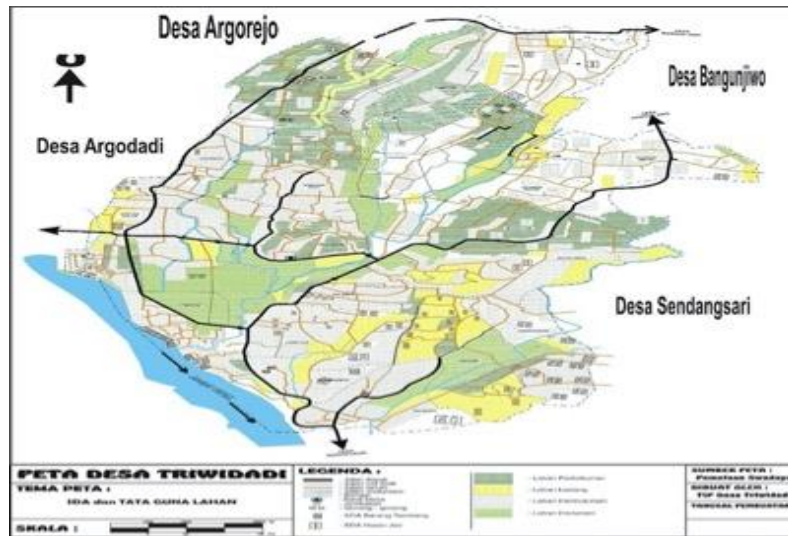
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berkelanjutan.
- Membangun kemandirian masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat.
- Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat melalui peningkatan keamanan publik, pengawasan, dan penanganan konflik.
- Mengembangkan kebudayaan dan spiritual masyarakat melalui pengembangan kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.
- Membangun ketangguhan masyarakat melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana, peningkatan kesadaran lingkungan, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

### **C. Kondisi Geografi**

Secara geografis, wilayah Kalurahan Triwidadi memiliki beberapa karakteristik. Pertama, secara umum kondisi tanah di Triwidadi tergolong subur sehingga dimungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Namun, masing-masing Pedukuhan memiliki potensi alam yang berbeda karena wilayah Triwidadi memiliki bentang alam yang terdiri dari pegunungan/perbukitan, dataran rendah. Di beberapa padukuhan seperti Guwo, Nanggul, Jojoran Wetan, Jojoran Kulon, Kersan, Gampeng, Kadireso, Blabak, Sabrang Lor, Sabrang Kidul, Polaman, Butuh Lor, Butuh Kidul, Ngincep, Jagonandan, Jambean sebagian besar wilayahnya adalah perbukitan dengan kondisi tanah liat dan berbatu kapur jadi potensial untuk pengembangan Hutan Rakyat, tanaman Holtikultura, Perkebunan, Tanam pangan local bawah tegakan, tanaman polowijo, peternakan serta pengembangan wisata alam seperti outbond dan camping ground. Sementara di Padukuhan Kalisoko, Plambongan, Trucuk, Kayuhan Kulon, Kayuhan Wetan, Pajangan yang cenderung wilayah perbukitanya sedikit berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan serta kawasan perdagangan dan jasa. Bahkan tiga wilayah pedukuhan Kayuhan Kulon, Trucuk dan Plambongan dilintasi aliran sungai progo yang potensi sebagai sumber daya air Pertanian, perikanan, serta pengembangan wisata air dan kuliner.



Gambar 1. 1 Peta Kalurahan Triwidadi



Sumber : <https://triwidadi.bantulkab.go.id/>

Secara geografi kalurahan Triwidadi terletak -7.854149" S, 110°12'40.8"E dengan suhu udara rata-rata berada di 18° - 35° C. Wilayah Kalurahan Triwidadi memiliki luas 111.9675 Ha dengan secara geografis berada di barat kabupaten Bantul serta memiliki batas wilayah diantaranya :

Bagian utara berbatasan dengan kalurahan Argomulyo dan Argorejo

Bagian selatan berbatasan dengan kalurahan Sendangsari, kapanewon Pajangan

Bagian barat berbatasan dengan kalurahan Argodadi, kapanewon sedayu

Bagian timur berbatasan dengan kalurahan Bangunjiwo, kapanewon Kasihan

Keadaan topografi kalurahan Triwidadi berada di ketinggian antara 60 s/d 160m diatas permukaan laut. Wilayah kalurahan Triwidadi hampir 80% merupakan daerah perbukitan dengan bentang alam lereng bukit, punggung bukit , lembah dan dataran dengan suhu rata-rata antara 19°C s/d 32°C dengan tingkat kelembaban antara 55 % s/d 85% dan kecepatan angin rata rata 8Km/Jam s/d 20Km/Jam. Di lembah antara bukit dengan bukit berpotensi mengalir sumber

mata air dan bentang dataran lembah sebagai lahan pertanian tanaman pangan. Kalurahan Triwidadi juga memiliki berbagai ekosistem dan habitat satwa liar hutan dan satwa air walaupun akhir akhir ini mulai pengurangan habitat satwa karena perburuan dan migrasi.

Secara geologi wilayah kalurahan Triwidadi memiliki tanah kapur berbatu, tanah liat berwarna hitam serta terdapat lapisan kerikil, tanah liat coklat dan tanah coklat berpasir. Pada umumnya tanah di kalurahan Triwidadi tergolong subur untuk ditanami berbagai tanaman pertanian, perkebunan, hortikultura dan tanaman hutan. Bahan tambang yang ada di kalurahan Triwidadi batu kapur, batu hitam, dan pasir. Sebagian besar penggunaan lahan saat ini yakni hutan rakyat dengan luas sekitar  $\pm 800$  Ha, pertanian  $\pm 223$  Ha, pemukiman  $\pm 51$  Ha, perkantoran dan pendidikan seluas  $\pm 6$  Ha dan peternakan  $\pm 10$  Ha. Secara tata ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bantul terdapat kawasan-kawasan yang masuk pengembangan pemukiman tersebar di 18 Padukuhan, kawasan industri di 3 padukuhan dan kawasan jasa dan perdagangan lainnya di 3 padukuhan. Namun kawasan hutan rakyat selain untuk pengembangan tanaman hutan juga sangat berpotensi guna pengembangan sektor wisata alam seperti outbond hingga camping ground. Untuk di daerah kawasan aliran sungai progo terdapat pengembangan wisata kuliner dan wisata air.

#### **D. Kondisi Demografi**

Secara demografi pertambahan penduduk yang setiap tahun meningkat tentunya akan terjadi suatu perubahan jumlah penduduk yang produktif dan tidak produktif. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif perlu disikapi dengan membuat kebijakan yang tepat terkait upaya untuk menyiapkan

kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana. Sementara untuk menanggapi pertumbuhan penduduk yang tidak produktif tentunya dibutuhkan suatu layanan bagi usia lanjut.

Kalurahan Triwidadi memiliki jumlah penduduk sebesar 11.159 jiwa dengan jumlah kepala keluarga berjumlah 3.760 KK dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 5.537 jiwa serta jumlah penduduk perempuan sebesar 5.622 jiwa.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan seorang individu dan dapat berdampak pada daerah atau wilayah ketika memiliki tingkat pendidikan yang baik. Oleh karena itu dalam sebuah wilayah seperti kalurahan harus memiliki tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal demi mendorong laju pembangunan wilayah yang signifikan.

Tabel 2. 1 Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>L</b>	<b>P</b>
Belum/Tidak Sekolah	871	1.112
Belum Tamat SD	600	641
Tamat SD	1.236	1.230
Tamat SMP	1.107	1.015
Tamat SMA	1.519	1.303
Tamat DI/II	15	30
Tamat DIII	43	93
Tamat DIV/S1	134	189
Tamat SII	12	8
Tamat SIII	-	1
Total	5.537	5.622

Sumber : <https://triwidadi.bantulkab.go.id/>

Masyarakat kalurahan Triwidadi memiliki tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan cukup tinggi hal ini bisa di lihat pada jumlah penduduk yang lulus pada pendidikan formal seperti SLTP, SLTA hingga Perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Walaupun rata-rata lulusan SD masih banyak, namun lulusan SD ini merupakan generasi yang lahir di tahun 1960an kebelakang.

b. Pekerjaan

Mayoritas masyarakat kalurahan Triwidadi bermata pencaharian sebagai buruh tidak tetap dan buruh harian lepas, karyawan swasta, petani dan buruh tani. Masyarakat dengan pekerjaan Buruh tidak tetap rata rata bekerja pada kontruksi bangunan seperti tukang batu, tukang kayu, tukang las yang tentunya rentan pada pemutusan hubungan kerja karena berkurangnya volume pekerjaan selain pekerjaan konstruksi saat ini mulai beralih menggunakan teknologi modern. Penggunaan Teknologi modern tentunya akan mengurangi volume pekerjaan manusia selain memang dengan teknologi akan lebih mempercepat, mempermudah serta meringankan pekerjaan manusia. Setiap tahunnya seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di Kalurahan terdapat penambahan jumlah pencari kerja kurang lebih 150 s/d 200 orang. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani saat ini biaya produksi dan oprasional pertanian yang semakin tinggi sehingga berpotensi penghasilan menurun selain kepemilikan lahan pertanian masyarakat semakin berkurang karena pembagian waris dan lain sebagainya.

Maka dengan menciptakan lapangan kerja dan menyiapkan masyarakat untuk mampu membuka usaha untuk menambah peluang kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya.

Tabel 2. 2 Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Triwidadi

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
BELUM/TIDAK BEKERJA	954	964
MENGURUS RUMAH TANGGA	0	479
PELAJAR/MAHASISWA	893	808
PENSIUNAN	46	11
PEGAWAI NEGERI SIPIL	66	39
TENTARA NASIONAL INDONESIA	12	0
KEPOLISIAN RI	17	3
PERDAGANGAN	8	20
PETANI/PEKEBUN	276	327
PETERNAK	16	3
KARYAWAN SWASTA	350	294
KARYAWAN BUMN	9	0
KARYAWAN HONORER	12	22
BURUH HARIAN LEPAS	1765	1443
BURUH TANI/PERKEBUNAN	513	595
TUKANG BATU	11	0
TUKANG KAYU	9	0
TUKANG JAHIT	0	6
MEKANIK	6	0
SENIMAN	1	0
DOSEN	3	1
GURU	11	22
BIDAN	0	5
PERAWAT	3	2
SOPIR	14	0
PEDAGANG	5	22
PERANGKAT DESA	23	8
WIRASWASTA	264	207
LAINNYA	77	128
<b>Total</b>	<b>5364</b>	<b>5480</b>

Sumber : <https://triwidadi.bantulkab.go.id/>

## **E. Kondisi Ekonomi**

### **➤ Potensi**

Terdapat potensi-potensi yang ada di kalurahan Triwidadi baik itu dalam bidang pertanian, perkebunan, sumber daya manusia, infrastruktur, wisata, kuliner, kerajinan dan lain-lain. Salah satu yang terkenal ialah sentra produsen gula jawa di kalurahan Triwidadi karena jumlah populasi tanaman kelapa yang banyak.

Kalurahan Triwidadi memiliki potensi besar dalam produksi kelapa, baik sebagai bahan baku maupun produk olahan seperti gula jawa. Dengan populasi pohon kelapa yang banyak, Triwidadi menjadi salah satu penyuplai utama kelapa muda di Yogyakarta. Namun, produksi gula jawa di Triwidadi mengalami penurunan, sehingga perlu adanya inovasi dan pengembangan untuk meningkatkan produksi. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pembudidayaan Kelapa Genjah Entog.

Bidang peternakan juga menjadi potensi di Kalurahan Triwidadi, dalam konteks ini peternakan ayam petelur merupakan potensi kalurahan di bidang peternakan yang memberikan pendapatan bagi masyarakat. Selain itu juga terdapat potensi sumber daya manusia dengan jumlah penduduk yang besar sehingga potensi sumber daya manusianya terbilang sangat potensial. Salah satu keuntungan dari jumlah penduduk yang besar tersebut adalah di bidang usaha jasa yang menguntungkan, seperti jasa transportasi, jasa konstruksi, dan lain-lain. Potensi wisata di Kalurahan Triwidadi yaitu potensi wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam di Kalurahan Triwidadi terdiri dari wisata hiking, camping, dan lain-lain. Wisata budaya di Kalurahan

Triwidadi, terdiri dari wisata budaya tradisional seperti upacara adat, tarian tradisional, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat potensi infrastruktur seperti jalan sedayu-pajangan yang merupakan akses antar kecamatan maupun kabupaten. Sehingga jalan yang melewati Kalurahan Triwidadi dapat memfasilitasi transportasi barang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi lokal.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pembangunan harus di mulai dengan upaya yang lebih mengenal perilaku sosial ekonomi masyarakat. Dengan cara itu maka pembangunan akan dapat menghapuskan kantong kemiskinan serta keterbelakangan yang ada. Kondisi masyarakat di kalurahan Triwidadi saat ini di tinjau dari pendapatan keluarga tergolong masuk kategori sedang hingga rendah. Perputaran Perekonomian tertinggi di Kalurahan Triwidadi di wilayah Pedukuhan Jagonandan yang perputaran ekonomi setiap harinya mencapai 750 Jt s/d 1,2 m perhari karena didukung tumbuhnya sector usaha peternakan ayam petelur diikuti pedukuhan sekitar seperti ngincep. Namun kalau ditinjau dari jumlah penduduk perputaran ekonomi yang besar seperti wilayah padukuhan plambongan, trucuk, dan kayuhan kulon selain itu didukung tingkat mobilitas lalu lintas masyarakat dari luar masyarakat Triwidadi karena sebagai satu perlintasan jalan provinsi sehingga banyak pertumbuhan perdagangan dan jasa. Sementara jika ditinjau dari pendapatan keluarga dengan mayoritas masyarakat Triwidadi yang bermata pencaharian sebagai buruh dan karyawan dengan didukung usaha pertanian dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki dan pengelolaan pertanian.

Pendapatan keluarga rata-rata berada di antara Rp 100.0000 s/d 150.000 perhari. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga setiap keluarga dengan kondisi saat ini untuk keperluan makan minum, pendidikan, sosial kemasyarakatan, operasional kerja dan lain sebagainya mencapai Rp. 100.000 sampai Rp 139.000 pendapatan masyarakat tergolong rendah bahkan secara umum masyarakat jarang memiliki tabungan yang bersifat tunai atau tabungan di bank sehingga pada suatu kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat seringkali melakukan pinjaman ke bank kredit harian atau yang sering disebut bank plecit, pinjam tetangga atau saudara serta menjual asset dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat yang masih memiliki lahan cukup biasanya menjual hasil hutan seperti kayu dan juga masyarakat yang memiliki ternak menjual hewan ternak. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya perlu berbagai terobosan dengan peningkatan ketrampilan untuk mampu , memiliki kapasitas kerja di dunia kerja, dalam usaha, penguatan keberanian usaha, pengembangan dan penguatan jaringan pasar, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.

## **F. Sosial Budaya**

### **a) Budaya dan adat istiadat**

Adat istiadat di Kalurahan Triwidadi cenderung dipengaruhi oleh adat Warisan Luhur nenek moyang orang jawa , Perjalanan dan perkembangan Keraton Yogyakarta dan Perkembangan masuknya agama islam Islam ke tanah jawa. Dalam kehidupan sehari hari masyarakat di Triwidadi memiliki tradisi yang merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang



ulang dengan cara yang sama. Sementara Budaya seluruh cipta, rasa, dan hasil karya yang tercipta di lingkungan masyarakat. Berasal dari karya masyarakat selanjutnya akan menghasilkan kebudayaan, teknologi kebendaan maupun kebudayaan jasmaniah yang akan digunakan oleh masyarakat untuk mempergunakan alam sekitarnya. keseluruhan yang bersifat kompleks dan rumit dan di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, moral, kepercayaan, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil juga kekuatan yang dapat diabadikan untuk keperluan manusia.

Di kalurahan Triwidadi masyarakat memiliki berbagai macam adat istiadat, tradisi dan budaya yang berkembang seperti suatu contoh upacara pernikahan, tingkeban, sepasaran atau selapanan bayi, muludan, saparan, ruwahan, suran, merti desa, dan lain sebagainya. Dari itu semua yang dapat kita ambil secara umum adalah kebersamaan dan kegotong royongan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman keamanan serta komunikasi ditengah masyarakat. Kebersamaan dan kegotong royongan masyarakat meliputi materi, tenaga, pikiran dan ini merupakan energi untuk mendorong suatu gerak pembangunan.

Selain itu juga terdapat nilai nilai dan norma yang terkandung ditengah masyarakat dalam hal pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam budaya kehidupan ditengah masyarakat juga memunculkan sebuah karya seni yang meliputi, kerajinan, pertunjukan,

gambar, arsitektur, dan lain sebagainya yang tentunya semua itu memberikan efek kebersamaan, stabilitas psikologis masyarakat, ekonomi, dan identitas suatu wilayah. Di sektor pangan juga pengembangan ada kuliner dan tanaman pangan lokal sesuai karakteristik alam suatu wilayah. Dalam hal bercocok tanam masyarakat juga memperhitungkan musim yang disebut Pranoto Mongso serta penerapan ilmu astronomi

b) Agama dan Kepercayaan

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya di suatu wilayah.

Tabel 2. 3 Kepercayaan Masyarakat Triwidadi

<b>AGAMA</b>	<b>L</b>	<b>P</b>
Hindu	-	-
Budha	-	-
Islam	5.492	5.566
Kristen Protestan	32	38
Kristen Katolik	12	14
Konghucu	-	-
Kepercayaan	1	4
Total	5.537	5.622

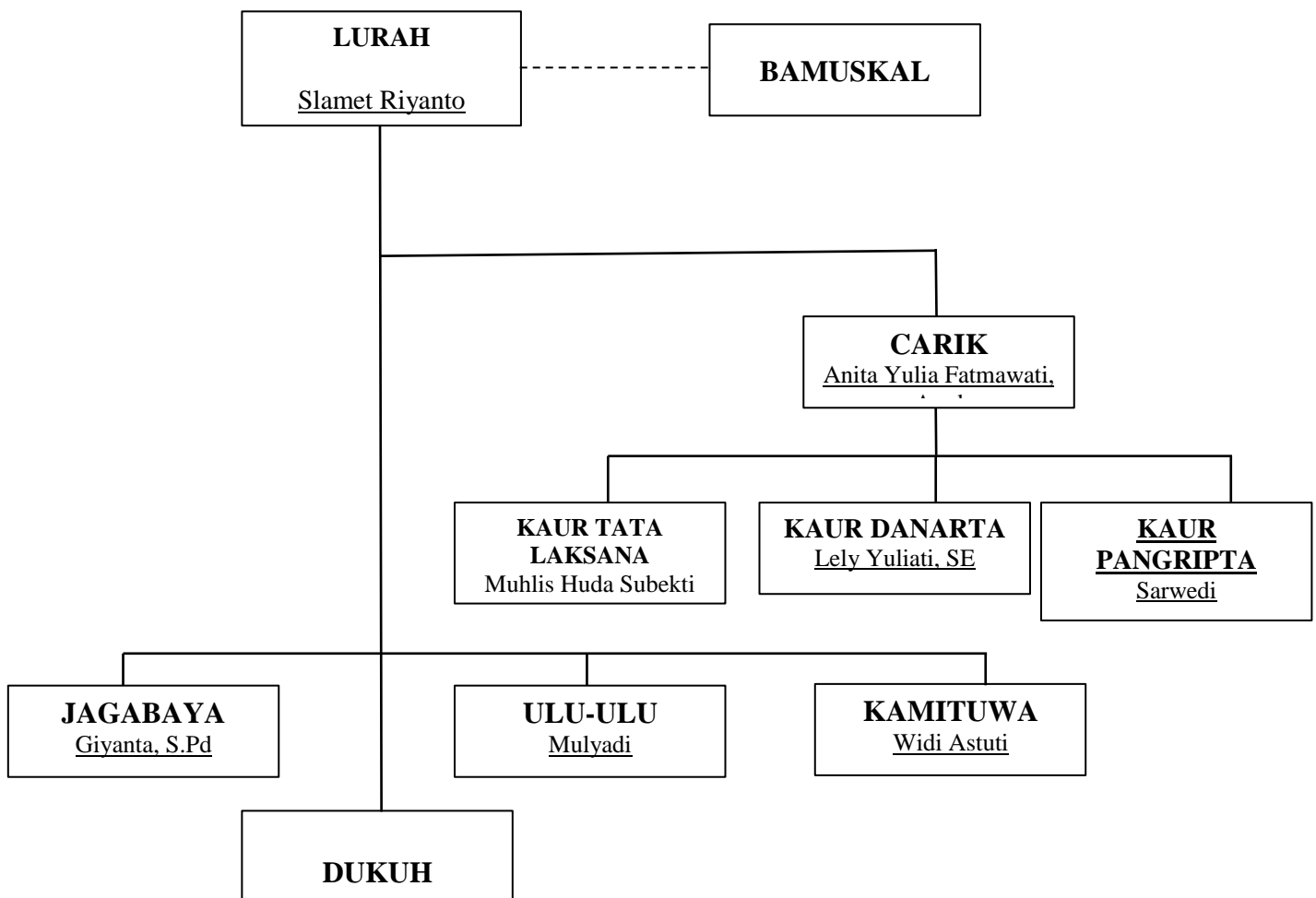
Sumber : <https://triwidadi.bantulkab.go.id/>

Masyarakat kalurahan Triwidadi memiliki pemeluk agama yang cukup beragam seperti Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan dengan dominasi masyarakat Triwidadi sebagai pemeluk agama Islam. Dengan melihat keragaman pada kepercayaan masyarakat tentunya menjaga

kerukunan antar umat beragama merupakan sebuah hal yang penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat guna membentuk aktivitas yang tentram dan damai antar sesama Masyarakat

#### G. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan

Tabel 2. 4 Struktur Pemerintahan Kalurahan Triwidadi



Sumber : <https://triwidadi.bantulkab.go.id/first/artikel/9>

a. Daftar Duku Setiap Padukuhan :

- 1) **GUWO** : MUKIYO
- 2) **GAMPENG** : WALUYO

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 3) JOJORAN KULON  | : MARJIMAN      |
| 4) JOJORAN WETAN  | : TUMIYO        |
| 5) BLABAK         | : ENDUNG DASUKI |
| 6) KADIRESO       | : SUYADI        |
| 7) SABRANG LOR    | : SAPARDI       |
| 8) SABRANG KIDUL  | : PARDI         |
| 9) NANGGUL        | : WAKIMIN       |
| 10) KERSAN        | : GIYONO        |
| 11) PAJANGAN      | : BUDIYANTO     |
| 12) BUTUH LOR     | : WARSIYO       |
| 13) BUTUH KIDUL   | : TRI HANDAYANI |
| 14) KAYUHAN KULON | : SUDADI        |
| 15) KAYUHAN WETAN | : WAJIYONO      |
| 16) POLAMAN       | : SUTARJAN, Amd |
| 17) JAMBEAN       | : HENDI         |
| 18) NGINCEP       | : SUBIYANA      |
| 19) JOGONANDAN    | : SARONTO       |
| 20) KALISOKO      | : SIYEM         |
| 21) PLAMBONGAN    | : SARWEDI       |
| 22) TRUCUK        | : DWI JANARI    |

b. BAMUSKal

- **KETUA** : RUSWANTO
- **WAKIL KETUA** : HERMAWAN, S.Pd
- **SEKRETARIS** : RIZKY DYAH ARI MUFTI, S.Pd
- **ANGGOTA** : TRIYATNO SEPUTRO, S.Pd  
: SUPARJAN, ST  
: MUJARI  
: DWI YANTO

**H. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal)**

a. Visi dan misi BUM Kal Triwidadi

1) Visi

"Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan yang Unggul, Mandiri, dan Berdaya Saing dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

2) Misi

- Pengembangan Potensi Lokal

Misi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi lokal dalam kalurahan, baik itu dalam bidang pertanian, industri kreatif, pariwisata, atau lainnya. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, dan berupaya agar meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Misi ini fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan akses ke modal usaha. Memberikan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi warga kalurahan sehingga mereka dapat mandiri dalam mengembangkan usaha mereka sendiri.

- **Keberlanjutan Lingkungan**

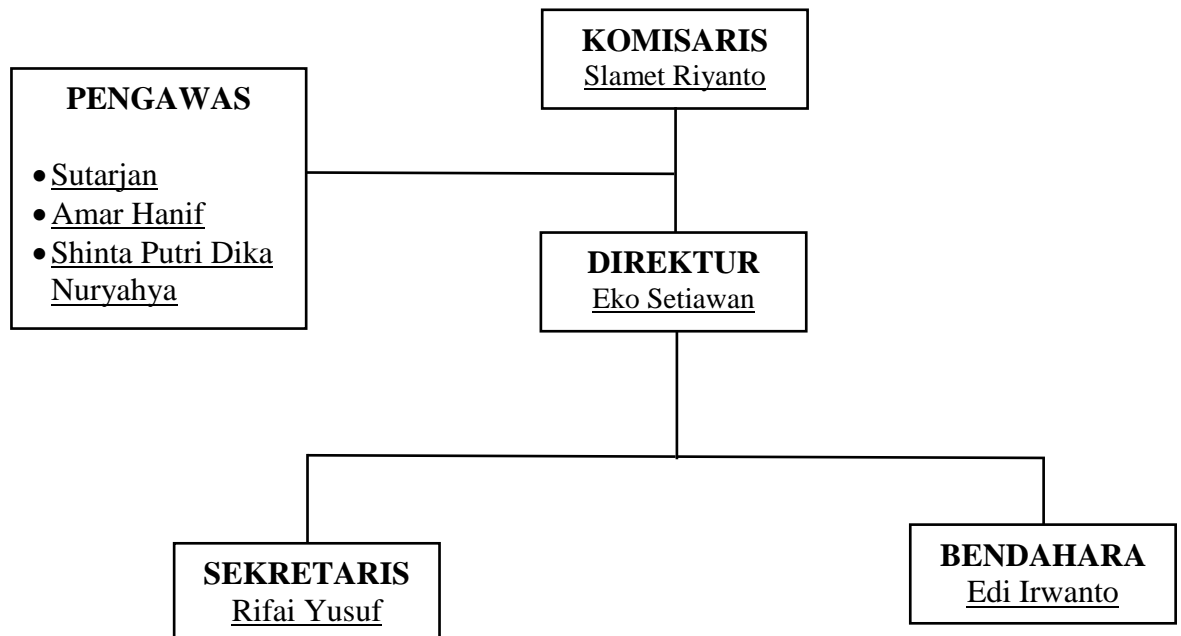
Misi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Mendorong penerapan praktik ramah lingkungan dalam semua aspek kegiatan usaha kalurahan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

- **Kolaborasi dan Kemitraan**

Mengupayakan kerja sama dan kemitraan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama dan memperluas sumber daya dan dukungan bagi kalurahan.

b. Struktur BUM Kal Triwidadi

Tabel 2. 5 Struktur BUM Kal Triwidadi



*Sumber : Dokumen Bumkal triwidadi 2025*

BUM kal Triwidadi pertama kali didirikan tahun 2019, lalu karena pandemi COVID-19, kegiatan BUMKal Triwidadi terpaksa dibekukan sementara waktu. Selama periode ini, BUMKal Triwidadi tidak aktif karena minim kegiatan yang dapat dilakukan. Namun, pada tahun 2023, BUMKal Triwidadi diaktifkan kembali dengan kepengurusan baru. Ketua BUMKal Triwidadi periode 2023/2024 berhasil lolos menjadi anggota legislatif, lalu di tahun 2024, BUMKal Triwidadi melakukan revitalisasi pengurus baru dengan menunjuk Eko setiawan sebagai direktur.

Pada Peraturan Kalurahan Triwidadi No 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Triwidadi terdapat unit-unit usaha yang

dijalankan oleh BUM Kal Triwidadi seperti dengan menjalankan bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan sosial dan finansial. Usaha BUM Kal triwidadi dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang ada maupun dengan teknologi yakni aktivitas penyewaan alat pesta, jasa boga pada event tertentu dengan menyediakan jasa cathering, aktivitas penjunjang kantor (fotocopy, percetakan, offset maupun digital dan lain-lain). BUM Kal Triwidadi saat ini masih dalam proses pengembangan, namun ada satu hal yang masih belum tertangani dengan baik, yaitu penentuan Penanggung Jawab (PJ) Unit Usaha. Sampai saat ini, belum ada orang yang secara resmi ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUM Kal Triwidadi. Dalam Ad/art BUM Kal Triwidadi (terlampir) mendapat modal awal dari berjumlah Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap penyertaan yakni tahap pertama sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kedua senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).



**BAB III**

**PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI**

**KALURAHAN**

Setelah memperoleh data lapangan lewat narasumber maka peneliti akan menganalisis dan membahas hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian. Hal ini dilakukan agar mendapatkan gambaran tentang bagaimana pemerintah kalurahan dalam pengembangan potensi kalurahan melalui BUM Kal Triwidadi. Pada penelitian ini terdapat delapan (8) informan yang di pilih yaitu Lurah, Carik, Kasi kesejahteraan dan Pembangunan (Ulu-ulu), Ketua Bamuskal, Direktur BUM Kal, Bendahara BUM Kal dan Masyarakat.

Penelitian ini membahas pada penggambaran program pemerintah kalurahan Triwidadi dalam pengembangan potensi kalurahan dan kerja sama dalam pengembangan potensi sesuai pada fokus dan data yang diperoleh peneliti lapangan. Sehingga dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengembangan potensi serta usaha kalurahan Triwidadi melalui Badan Usaha Milik Kalurahan Triwidadi dengan data-data dan informasi yang di gunakan seperti dokumentasi, hasil wawancara serta berupa data lainnya yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

**A. Program Pengembangan Potensi Kalurahan**

Pengembangan potensi kalurahan merupakan salah satu upaya pemerintah kalurahan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengoptimalkan potensi serta usaha yang ada di kalurahan. Hal ini bertujuan

untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Dengan demikian, Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kalurahan. Dalam pelaksanaannya, program pengembangan potensi kalurahan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kalurahan, masyarakat, dan stakeholders lainnya. Oleh karena itu terdapat program yang didukung oleh berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat kalurahan dalam mengembangkan potensi yang ada. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kalurahan.

Salah satu contoh program pengembangan potensi kalurahan yakni pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kalurahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan mengembangkan usaha UMKM yang berbasis pada potensi lokal.

Berikut ini merupakan hasil wawancara secara langsung peneliti bersama Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah Triwidadi, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Secara geografis kalurahan memiliki potensi seperti jalan provinsi kayuhan-kalisoko yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perdagangan. Berbicara tentang program untuk pengembangan potensi, dari pemerintah kalurahan salah satunya adalah penyertaan modal ke BUM Kal Triwidadi yang

dimana BUM Kal ini merupakan sebuah badan usaha milik kalurahan yang disitu harapannya bisa berkontribusi kepada pemerintah kalurahan yang bisa meningkatkan PAD atau pendapatan asli desa/kalurahan. Jadi BUM Kal itu sendiri berkembang dari beberapa unit usaha seperti penyewaan lapak, cathering, ATK, event organizer dan lain sebagainya. Di sisi lain kita mendorong bagaimana BUM Kal itu tumbuh dan berkembang melalui dengan kerja sama antar pengurus maupun dengan pemerintah kalurahan. Ketika terdapat kegiatan di kalurahan pengadaan barang dan jasa hingga catering kita lebih merekomendasikan melalui BUM Kal. Pemerintah kalurahan ingin selalu mau agar BUM Kal ini bisa terus hidup dan berjalan dengan cara mengoptimalkan unit usaha BUM Kal salah satunya adalah belanja-belanja pemerintah kalurahan lewat unit usaha BUM Kal.” (wawancara 23 januari 2025, 13.45)

Dari pernyataan Lurah diatas dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Triwidadi memiliki potensi geografis yang strategis, terutama dengan adanya jalan provinsi Kayuhan-Kalisoko, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha perdagangan. Untuk mendukung pengembangan potensi ini, pemerintah kalurahan berupaya meningkatkan perekonomian desa melalui penyertaan modal ke BUM Kal Triwidadi. BUM Kal, sebagai Badan Usaha Milik Kalurahan, diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui berbagai unit usaha yang dijalankannya, seperti penyewaan lapak, katering, alat tulis kantor (ATK), event organizer, dan lainnya.

Maka agar BUM Kal dapat terus tumbuh dan berkembang, diperlukan sinergi yang kuat antara pengurus BUM Kal dan pemerintah kalurahan. Salah satu bentuk dukungan konkret yang dilakukan adalah dengan merekomendasikan BUM Kal sebagai penyedia utama dalam kegiatan-kegiatan kalurahan, termasuk pengadaan barang dan jasa serta katering. Pemerintah kalurahan juga terus berkomitmen untuk mengoptimalkan unit

usaha BUM Kal dengan memastikan bahwa belanja kalurahan dilakukan melalui unit usaha yang dikelola BUM Kal. Dengan strategi ini, diharapkan BUM Kal dapat terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat kalurahan.

Sementara itu hasil wawancara bersama Bapak Mulyadi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-ulu) mengatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka pengembangan pemerintah kalurahan memberikan penyertaan modal untuk berjalannya kegiatan usaha BUM Kal dan dari 2019 sampai 2025 pemerintah kalurahan sudah tiga kali memberikan penyertaan modal untuk kelancaran kegiatan. Kedua juga ada dalam rangka membantu pengembangan dengan mengakses pemerintah daerah dan pusat pada tahun 2021 kita juga membantu fasilitas BUM Kal berupa penganggaran Rp 50.000.000,00 pada saat itu dan kita alokasikan untuk pembangunan lapak-lapak untuk berdagang dan sampai sekarang sudah dimanfaatkan untuk UMKM. Selain itu juga kita mulai mengalokasikan beberapa kegiatan yang ada di kalurahan seperti rapat-rapat atau pertemuan untuk bekerja sama dengan BUM Kal biasanya untuk snack dan makan minum dan belanja barang agar nanti terdapat efisiensi lalu kedua juga ada bagi hasil untuk BUM Kalnya. Kemudian kita juga sudah membangun sarana prasarana umum seperti alun-alun disitu pengelolaannya nanti bersama dengan BUM Kal.” (wawancara 22 januari 2025, 11.56)

Dari pernyataan Ulu-ulu diatas dapat di simpulkan bahwa Sejak tahun 2019 hingga 2025, pemerintah kalurahan telah memberikan penyertaan modal sebanyak tiga kali untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal). Penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas BUM Kal agar dapat menjalankan usahanya dengan lebih stabil dan berkembang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah

kalurahan dalam mengembangkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan BUM Kal sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelola potensi ekonomi di tingkat desa. Dengan adanya dukungan modal yang berkelanjutan, diharapkan BUM Kal dapat semakin mandiri dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan warga.

Selain memberikan penyertaan modal, pemerintah kalurahan juga turut memfasilitasi pengembangan BUM Kal dengan mengakses bantuan dari pemerintah daerah dan pusat. Pada tahun 2021, pemerintah kalurahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 untuk pembangunan lapak-lapak yang diperuntukkan bagi pedagang, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembangunan lapak ini bertujuan untuk menciptakan ruang usaha yang lebih terstruktur dan nyaman bagi para pedagang, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, lapak-lapak tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah kalurahan dalam mendukung sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain upaya penyertaan modal dan pembangunan infrastruktur ekonomi, pemerintah kalurahan juga berupaya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan melibatkan BUM Kal dalam berbagai kegiatan resmi kalurahan. Dalam setiap pelaksanaan rapat, pertemuan, atau pengadaan barang, pemerintah kalurahan bekerja sama dengan BUM Kal, terutama dalam penyediaan konsumsi dan kebutuhan lainnya. Dengan cara ini, BUM Kal tidak

hanya mendapatkan peluang usaha tambahan, tetapi juga memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan. Selain itu, pemerintah kalurahan juga telah membangun sarana prasarana umum, seperti alun-alun, yang pengelolaannya akan dilakukan bersama dengan BUM Kal. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas publik tersebut dengan lebih baik, sekaligus memberikan peluang bagi BUM Kal untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal.

Wawancara bersama bapak Eko setiawan selaku Direktur BUM Kal mengatakan sebagai berikut :

“Untuk BUM Kal sendiri akan diarahkan itu lebih kepada pematangan sih mas. Jadi BUM Kal ini akan diarahkan untuk belajar lagi dengan melakukan studi banding ke BUM Kal-BUM Kal dikalurahan lain yang lebih maju dan nanti bagaimana kami mempelajari sistemnya seperti apa dan menerapkan yang cocok di Triwidadi itu seperti apa. Dan untuk pengadaan barang dan jasa akan kita kembangkan pada pasar online atau online shop karna harga di online itu lebih murah dari pada harga ketika ditoko. Makanya nanti supaya keuntungannya itu di dapat lebih besar yang didapatkan BUM Kal kami akan meriset kualitas dari tokonya supaya mendapat produk yang baik juga. Lalu untuk sewa lapak lebih kepada kematangan atau memberikan pelatihan dan pemberian materi kepada pedagang untuk bagaimana melihat target pasar dan bagaimana membagi keuntungan dan modal (cashflow). Karena pedagang yang ada minim pengetahuan tentang itu, jadi mandek bayar sewa dan banyak yang tidak bisa melanjutkan usahanya lagi. Kalau untuk EO ketika kalurahan ada kegiatan missal pelatihan terus pengajian nah itu kita yang handel nanti dari kalurahan kasih RABnya berapa terus potong pajaknya berapa nanti tinggal kita menyesuaikan.” (Wawancara 26 Januari 2025)

Dari pernyataan Direktur BUM Kal dapat di simpulkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Triwidadi akan

difokuskan pada pematangan sistem dan peningkatan kapasitas pengelolaan. Salah satu langkah utama adalah melakukan studi banding ke BUM Kal di kalurahan lain yang lebih maju untuk memahami dan mengadaptasi sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan mempelajari praktik terbaik dari tempat lain, BUM Kal diharapkan dapat mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam aspek pengadaan barang dan jasa, BUM Kal akan memanfaatkan pasar online karena harga di platform digital umumnya lebih murah dibandingkan dengan toko konvensional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh BUM Kal. Namun, untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga, riset terhadap toko online yang menjadi mitra akan dilakukan agar barang yang dibeli memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, program pelatihan dan pemberian materi akan diberikan kepada pedagang terkait manajemen keuangan, seperti cara membagi keuntungan dan modal (cash flow). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam mengelola usaha mereka, mengurangi kasus keterlambatan pembayaran sewa lapak, serta mencegah bisnis mereka terhenti akibat kurangnya pemahaman manajerial. Sementara itu, dalam bidang event organizer (EO), BUM Kal juga menangani berbagai kegiatan kalurahan, seperti pelatihan, pengajian, dan event lainnya dengan menyesuaikan anggaran dan perhitungan pajak yang diberikan oleh kalurahan.

Hal demikian pun turut di katakan oleh pak Ruswanto selaku Ketua Bamuskal sebagai berikut :

“Bamuskal ini turut menyetujui penyertaan modal jadi bamuskal juga memantau perkembangan dari BUM Kal. Dan untuk tahun 2024 kemarin bamuskal menyetujui penyertaan modal sebesar Rp 150.000.000,00 dan itu sudah berjalan juga usaha-usaha dari BUM Kal juga sudah berjalan terutama di sewa lapak, cathering, pengadaan barang jasa, jasa keuangan, ATK, dan EO.” (Wawancara 23 Januari 2025)

Dari pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dapat disimpulkan bamuskal mendukung perkembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal), salah satunya melalui persetujuan penyertaan modal. Selain memberikan dukungan finansial, Bamuskal juga berperan dalam memantau perkembangan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh BUM Kal. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan BUM Kal dapat mengoptimalkan pengelolaan modal yang diberikan sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat kalurahan. Pada tahun 2024, Bamuskal telah menyetujui penyertaan modal sebesar Rp 150.000.000,00 untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha BUM Kal. Dengan adanya tambahan modal ini, berbagai unit usaha BUM Kal dapat berjalan lebih optimal dan memperluas cakupan bisnisnya. Penyertaan modal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUM Kal serta menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Sejumlah usaha yang telah dijalankan oleh BUM Kal, seperti penyewaan lapak, katering, pengadaan barang dan jasa, jasa keuangan, alat tulis kantor (ATK), serta event organizer (EO), menunjukkan bahwa BUM Kal telah mengembangkan berbagai lini bisnis untuk mendukung ekonomi lokal.



Dengan pengelolaan yang baik dari BUM Kal dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah kalurahan dan bamuskal, usaha-usaha ini berpotensi semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli kalurahan serta bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil wawancara bersama Bendahara BUM Kal yakni Bapak Edi Irwanto, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Program ini merupakan upaya untuk mengembangkan potensi kalurahan seperti mengkoordinasi pedagang-pedagang dengan kita buat lapak-lapak di alun-alun, lalu ada catering yaitu kita merangkul mitra-mitra BUM Kal dalam artian masyarakat yang suka menyediakan catering untuk acara-acara kita rangkul untuk dapat menyediakan kebutuhan yang ada di kalurahan, ada program eo jadi di kalurahan itu biasanya ada pelatihan-pelatihan jadi kita mengkoordinasi antara kalurahan sama acaranya gitu, ada lagi program pengadaan barang dan jasa yang di butuhkan Masyarakat maupun kalurahan, juga ada penyediaan alat tulis kantor dan program jasa keuangan dalam bentuk admin transfer. Namun untuk pendapatan brutonya masih minim mas, terus laporan laba ruginya masih minus terus. Jadi belum memberikan kontribusi pendapatan untuk kalurahan.”  
(Wawancara 05 Februari 2025)

Dari pernyataan bapak Edi Irwanto dapat di simpulkan bahwa terdapat program-program yang dijalankan oleh BUM Kal yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kalurahan dengan berbagai inisiatif yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Salah satu upayanya adalah dengan mengkoordinasi pedagang melalui penyediaan lapak-lapak di alun-alun, sehingga mereka memiliki tempat yang lebih teratur dan strategis untuk berjualan. Selain itu, dalam sektor catering, program ini merangkul masyarakat yang memiliki usaha penyediaan makanan untuk acara-acara di kalurahan. Dengan demikian, kebutuhan kuliner dalam berbagai kegiatan dapat dipenuhi

oleh pelaku usaha lokal, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, program ini juga mencakup penyelenggaraan event organizer (EO) yang bertujuan untuk mengoordinasikan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kalurahan. Dengan adanya EO, setiap kegiatan dapat dikelola lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi peserta maupun penyelenggara. Tak hanya itu, BUM Kal juga berperan dalam program pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat maupun pemerintah kalurahan. Penyediaan kebutuhan ini memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah oleh warga, sekaligus mendukung usaha lokal yang terlibat dalam proses pengadaan.

Gambar 3. 1 Ruko Unit Usaha ATK



*Sumber : Dokumentasi Peneliti 2025*

Selain sektor perdagangan dan jasa, program ini juga mencakup penyediaan alat tulis kantor serta layanan jasa keuangan berupa administrasi transfer. Langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratif mereka tanpa harus bergantung pada

layanan dari luar kalurahan. Dengan berbagai inisiatif ini, program pengembangan potensi kalurahan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber daya lokal dengan harapan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat.

Namun pendapatan bruto yang dihasilkan masih minim, sementara laporan laba rugi menunjukkan hasil yang terus mengalami kerugian. Bahkan, laporan keuangan menunjukkan bahwa laba rugi masih mengalami defisit, sehingga belum mampu memberikan kontribusi positif bagi pendapatan kalurahan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa program pemerintah kalurahan dalam pengembangan potensi kalurahan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Triwidadi dengan memberikan penyertaan modal kepada BUM Kal agar dikelola melalui usaha-usaha yang nantinya dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli kalurahan. Usaha-usaha BUM Kal yang ada merupakan bentuk dari program-program kolaboratif antara pemerintah kalurahan dan BUM Kal dalam upaya mengembangkan potensi kalurahan yang ada. Selain itu juga bentuk terdapat dukungan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan yaitu dengan merekomendasikan BUM Kal sebagai penyedia utama dalam kegiatan-kegiatan kalurahan, seperti event organizer, belanja ATK, pengadaan barang dan jasa serta catering.

Berbagai usaha yang dikelola oleh BUM Kal bertujuan untuk memberikan layanan yang bermanfaat bagi warga serta menciptakan sumber

pendapatan bagi kalurahan. Beberapa usaha yang telah dijalankan oleh BUM Kal meliputi Event Organizer (EO), jasa keuangan, jasa pengadaan, sewa lapak, katering, dan penyediaan alat tulis kantor (ATK). Event Organizer (EO) merupakan salah satu unit usaha yang bertugas mengelola berbagai kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi di kalurahan.

Dalam menjalankan usaha ini, BUM Kal memanfaatkan sumber daya lokal, baik dalam hal tenaga kerja maupun peralatan, untuk memastikan bahwa setiap acara dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan klien. Dengan adanya EO, masyarakat dan instansi di kalurahan tidak perlu lagi mencari jasa penyelenggara acara dari luar karena sudah tersedia layanan profesional yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kal.

Gambar 3. 2 Lapak-lapak di alun-alun Triwidadi yang dapat disewa



*Sumber : Dokumentasi Peneliti 2025*

Selain EO, BUM Kal juga mengelola jasa keuangan yang menyediakan layanan transfer bank, sehingga masyarakat yang memiliki

keterbatasan akses ke layanan perbankan dapat lebih mudah melakukan transaksi keuangan. Di bidang jasa pengadaan, BUM Kal bertanggung jawab dalam mengelola pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kalurahan maupun masyarakat. Usaha sewa lapak juga menjadi salah satu bidang yang dikelola oleh BUM Kal, di mana unit usaha ini menyediakan tempat (Alun-alun Triwidadi) bagi pedagang dan pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya.

Selain itu, BUM Kal turut mengembangkan usaha katering yang menyediakan layanan penyediaan makanan untuk berbagai acara. Terakhir, dalam bidang penyediaan alat tulis kantor (ATK), BUM Kal memastikan ketersediaan kebutuhan peralatan kantor bagi instansi maupun masyarakat setempat. Sehingga dalam menjalankan usaha-usaha tersebut terdapat upaya yang akan dilakukan oleh BUM Kal sebagai bentuk pengembangannya seperti akan mengadakan studi banding ke BUM Kal di kalurahan lain yang lebih maju dan memberikan pelatihan dan edukasi kepada pedagang dan UMKM dalam mengatur cashflow mereka agar terjadi pengelolaan ekonomi yang baik bagi para pedagang dan UMKM yang berjualan di Alun-alun Triwidadi.

Meskipun usaha-usaha tersebut memiliki cakupan yang luas dan berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian lokal, hasil yang diperoleh masih belum optimal. Pendapatan bruto yang dihasilkan masih minim, sementara laporan laba rugi menunjukkan hasil yang terus mengalami kerugian. Dengan demikian, program ini belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan kalurahan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi yang diterapkan, baik dalam

aspek operasional maupun pengelolaan keuangan, agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Gambar 3. 3 Laba rugi BUMKal Triwidadi 2020-2024

<b>LABA / RUGI</b>					
1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2024					
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan Usaha	-	-	-	24,198,000	30,926,000
Pendapatan Sewa Lapak	-	-	-	4,600,000	2,318,500
Pendapatan Catering	42,268,000	14,887,000	43,245,000	-	971,200
Pendapatan ATK	-	-	-	-	7,674,654
Pendapatan Event Organizer	-	-	-	2,000	759,120
Pendapatan Agen	-	-	-	-	4,344,755
Pendapatan Pengadaan Barang	-	-	-	-	-
<b>Pendapatan Lainnya</b>					
Pendapatan bunga bank	58,990	62,332	176,372	87,318	112,275
Pendapatan parkir	-	-	-	-	4,000,000
Pendapatan lapak event	-	-	-	-	1,515,000
Pendapatan lainnya	-	-	-	1,455,000	1,683,000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>42,326,990</b>	<b>14,949,332</b>	<b>43,421,372</b>	<b>30,342,318</b>	<b>54,304,504</b>
<b>PENGELUARAN</b>					
Biaya Operasional					
Honor	18,000,000	30,000,000	30,000,000	29,650,000	29,400,000
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>18,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>29,650,000</b>	<b>29,400,000</b>
Biaya Administrasi dan Umum					
Biaya Telepon	60,000	60,000	899,500	53,000	21,000
Biaya Listrik	-	1,030,000	4,532,000	5,499,000	5,633,000
Biaya Bank	-	-	-	121,000	-
Biaya Meeting dan Training	126,000	98,000	-	277,000	607,000
Biaya Makan	-	-	-	64,000	-
<b>Total Biaya Administrasi dan Umum</b>	<b>186,000</b>	<b>1,188,000</b>	<b>5,431,500</b>	<b>6,014,000</b>	<b>6,261,000</b>
Biaya					
Biaya ATK	130,600	169,000	8,000	741,500	357,000
Biaya Transport	1,505,000	650,000	35,000	74,000	20,000
Biaya Pembersih	1,500,574	848,500	3,600,000	4,354,000	5,000,000
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	14,000,000	5,807,000	56,000	2,046,500	601,000
<b>Total Biaya</b>	<b>17,136,174</b>	<b>7,474,500</b>	<b>3,699,000</b>	<b>7,216,000</b>	<b>5,978,000</b>
Biaya Lain Lain					
Biaya lain Lain	365,000	16,000	6,000	9,515,000	-
Biaya Administrasi Bank	78,000	78,000	83,000	90,000	312,278
Biaya Pajak Bunga Bank	11,720	12,468	35,274	17,465	16,177
Biaya Pajak Pendapatan Agen	-	-	-	40	3,590
<b>Total Biaya Lain Lain</b>	<b>454,720</b>	<b>106,468</b>	<b>124,274</b>	<b>9,622,505</b>	<b>332,045</b>
Biaya Penyusutan					
Biaya Penyusutan Inventaris Komputer	-	-	-	258,000	1,032,000
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,419,951	2,079,804
Biaya Penyusutan Inventaris Gerobak	-	12,533,360	18,800,040	18,800,040	18,800,040
Biaya Penyusutan Inventaris Lapak	-	-	416,668	5,000,016	5,000,016
<b>Total Biaya Penyusutan</b>	<b>1,200,000</b>	<b>13,733,360</b>	<b>20,416,708</b>	<b>25,478,007</b>	<b>26,911,860</b>
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>36,976,894</b>	<b>52,502,328</b>	<b>59,671,482</b>	<b>77,980,512</b>	<b>68,882,905</b>
<b>LABA / RUGI</b>	<b>5,350,096</b>	<b>(37,552,996)</b>	<b>(16,250,110)</b>	<b>(47,638,194)</b>	<b>(14,578,401)</b>

Sumber : Dokumen BUMKal triwidadi

## B. Kerja Sama dalam Pengembangan Potensi Kalurahan

Upaya dalam pengembangan potensi kalurahan salah satunya yakni menjalin kerja sama dengan pihak-pihak dengan harapan agar menjadi mitra dalam pengembangan potensi serta usaha yang ada. Maka kerja sama ini dapat dilakukan dengan berbagai elemen, seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat yang memiliki kepentingan dalam kemajuan ekonomi dan sosial di tingkat kalurahan. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kalurahan dapat memperoleh

pendampingan, akses terhadap program bantuan, serta pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha dan potensi lokal. Selain itu, kemitraan dengan lembaga swasta dapat membuka peluang investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di kalurahan, baik dalam bentuk penyediaan modal usaha, pemasaran produk lokal, maupun transfer teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di sisi lain, kemitraan dengan komunitas masyarakat serta organisasi sosial juga penting dalam meningkatkan partisipasi warga dalam mengembangkan berbagai program atau usaha BUM Kal. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, usaha kalurahan dapat dikelola secara lebih optimal, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara bersama bapak Slamet Riyanto selaku Lurah, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau untuk kerja sama itu dengan vendor-vendor produsen barang dan jasa atau pemasaran barang dan jasa itu salah satunya itu dan juga saya cenderung kerja sama ke organisasi-organisasi atau lembaga swasta saya tidak memakai lsm karna kalau bicara bisnis sebuah usaha itu biasanya kita kerja sama dengan swasta. Juga selama ini untuk kerja samanya masih dalam lingkup masyarakat khususnya penyedia atau produsen bahan atau kebutuhan yang dibutuhkan di skala desa. Untuk kerja sama dengan organisasi dalam lingkup kalurahan BUM Kal bekerja sama dengan karang taruna, PKK dan lain-lain tapi ketika sebuah organisasi itu melakukan kegiatan di sarankan untuk belanja saja ke BUM Kal melalui jasa BUM Kal.” (Wawancara 23 Januari 2025)

Dari pernyataan bapak Slamet Riyanto selaku Lurah dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUM Kal lebih banyak melibatkan vendor-vendo atau produsen barang dan

jasa serta pemasaran produk untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasional. Dalam menjalin kemitraan, BUM Kal lebih memilih untuk bekerja sama dengan organisasi atau lembaga swasta dibandingkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena pendekatan bisnis dan usaha lebih sesuai jika dilakukan dengan sektor swasta. Dengan strategi ini, BUM Kal dapat mengoptimalkan kerja sama yang berorientasi pada keuntungan dan pengembangan usaha secara profesional.

Hingga saat ini, kerja sama yang dilakukan oleh BUM Kal masih berfokus pada lingkup masyarakat setempat, terutama dengan penyedia dan produsen bahan atau kebutuhan yang diperlukan dalam skala desa. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung ekonomi lokal dengan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah kalurahan. Dengan memanfaatkan sumber daya dari dalam masyarakat, BUM Kal tidak hanya memperoleh keuntungan bisnis, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi warga sekitar. Selain kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat umum, BUM Kal juga menjalin kemitraan dengan organisasi yang berada dalam lingkup kalurahan, seperti Karang Taruna dan PKK. Organisasi-organisasi ini didorong untuk memanfaatkan layanan dan produk yang disediakan oleh BUM Kal dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan. Dengan demikian, terjadi sinergi antara berbagai elemen masyarakat dalam mendukung keberlanjutan BUM Kal sebagai badan usaha yang berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan komunitas.

Sementara itu hasil wawancara bersama bapak Eko Setiawan selaku Direktur BUM Kal sebagai berikut:



“Kita baru melakukan kerja sama itu dengan usaha masyarakat seperti sound system, lightning, panggung karna nanti setiap ada event itu kita memakai itu selain itu karna cukup banyak tukang las di triwidadi kita juga bekerja sama dengan tukang las seperti untuk pengadaan barang dan jasa seperti tempat bermain untuk anak-anak di Taman Kanak-kanak itu salah satunya. Dan juga itu merupakan untuk memanfaatkan potensi yang ada di triwidadi supaya berkembang. Lalu ada catering itu kami bekerja sama dengan pelaku usaha yang ada di triwidadi, juga dalam pengadaan barang dan jasa kami juga berusaha agar belanja barang itu bekerja sama dengan usaha masyarakat di kalurahan. Kerja sama BUM Kal sejauh ini cenderung bersama dengan pemerintah kalurahan, masyarakat dan pelaku usaha di triwidadi, supaya perputaran uangnya itu tidak keluar dari kalurahan tapi berputar di dalam kalurahan dulu. Tapi untuk kedepannya mas kami juga sempat berupaya untuk menjalin kerja sama dengan BUM Kal di kalurahan lain untuk membuat usaha bersama tapi untuk kalurahan yang berdekatan dengan triwidadi.” (Wawancara 26 Januari 2025)

Dari pernyataan bapak Eko Setiawan diatas dapat di simpulkan bahwa BUM Kal Triwidadi aktif dalam menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lokal dalam berbagai sektor untuk mendukung pengembangan potensi kalurahan dalam hal ini ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk kerja sama yang telah dijalankan adalah dengan penyedia jasa seperti sound system, lightning, dan panggung untuk berbagai acara yang diadakan di kalurahan. Selain itu, BUM Kal juga menggandeng tukang las lokal dalam penyediaan barang dan jasa, seperti pembuatan fasilitas bermain anak-anak di Taman Kanak-kanak. Upaya ini menunjukkan komitmen BUM Kal dalam memberdayakan pelaku usaha setempat serta memanfaatkan sumber daya yang ada di Triwidadi agar semakin berkembang.

Selain dengan pelaku usaha, BUM Kal juga berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mendukung

roda perekonomian lokal. Dalam sektor katering serta pengadaan barang dan jasa, BUM Kal berusaha memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melibatkan usaha masyarakat di Triwidadi. Strategi ini bertujuan agar perputaran uang tetap berada di dalam kalurahan, sehingga keuntungan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Dengan pola kerja sama ini, BUM Kal tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung di tingkat lokal.

Untuk kedepan BUM Kal Triwidadi tidak hanya akan berfokus pada lingkup internal, tetapi juga berencana memperluas kerja sama dengan BUM Kal dari kalurahan lain yang berdekatan. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka peluang usaha yang lebih besar dan menciptakan sinergi antar-kalurahan dalam mengembangkan potensi ekonomi bersama. Dengan adanya kolaborasi lintas kalurahan, BUM Kal dapat memperluas jangkauan bisnisnya, meningkatkan daya saing, serta menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar Triwidadi.

Hasil wawancara bersama bapak Edi Irwanto selaku Bendahara BUM Kal sebagai berikut:

“Jadi memang dalam kerja BUM Kal saat ini memang kita cenderung pada kolaborasi untuk menjalankan program seperti usaha-usaha catering, pengadaan barang dan jasa hingga event organizer. Kolaborasi ini sebagai bentuk dari kerja sama kami di BUM Kal mas, dengan merangkul mitra-mitra seperti usaha-usaha masyarakat ditriwidadi dalam mendapatkan pasar walaupun cakupannya masih dalam kalurahan tapi setidaknya agar potensi sumberdaya yang ada ini dapat kita kelola terus mas. Itu tadi mas jadi kerja sama yang dilakukan itu baru dalam kalurahan kerja sama dengan

masyarakat dan pelaku usaha di triwidadi.” (Wawancara 05 Februari 2025)

Dari pernyataan bapak Edi Irwanto diatas dapat di simpulkan bahwa BUM Kal saat ini menerapkan pendekatan kolaboratif dalam menjalankan berbagai program usahanya, termasuk di sektor katering, pengadaan barang dan jasa, serta event organizer. Kolaborasi ini bertujuan untuk merangkul mitra-mitra usaha masyarakat yang ada di Triwidadi agar mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Meskipun cakupan kerja sama ini masih terbatas di dalam kalurahan, upaya ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang tersedia. Dalam praktiknya, kerja sama yang dijalankan oleh BUM Kal masih berfokus pada lingkup internal kalurahan, di mana keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal menjadi prioritas utama.

Hal ini bertujuan agar potensi ekonomi yang ada dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan, tanpa harus bergantung pada pihak luar. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam berbagai sektor, BUM Kal berusaha menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi kalurahan. Namun strategi kolaboratif ini dapat terus dikembangkan agar jangkauan pasar semakin luas, baik di dalam maupun di luar kalurahan.

Dengan pengalaman yang telah diperoleh dari kerja sama di tingkat lokal, BUM Kal memiliki potensi untuk memperluas jaringannya dan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti BUM Kal di kalurahan lain. Dengan

langkah ini, BUM Kal tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Triwidadi, tetapi juga dalam menciptakan peluang usaha baru yang lebih besar, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Maka dalam hal ini BUM Kal secara aktif dalam menjalin kemitraan dengan organisasi lokal, seperti Karang Taruna dan PKK, untuk memanfaatkan layanan dan produk yang disediakan dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan. Dengan cara ini, BUM Kal berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung keinginan dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, BUM Kal berkomitmen untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dalam sektor katering dan pengadaan barang yang melibatkan usaha masyarakat di Triwidadi, sehingga keuntungan ekonomi dapat dinikmati oleh warga sekitar. Strategi ini menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Kalurahan. Selain itu juga BUM Kal Triwidadi berencana untuk memperluas kerja sama dengan BUM Kal dari kalurahan lain yang berdekatan. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka peluang usaha yang lebih besar dan menciptakan sinergi antar-kalurahan dalam mengembangkan potensi ekonomi bersama.

Dengan memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan daya saing, BUM Kal tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Triwidadi, tetapi juga dalam menciptakan peluang usaha baru yang lebih besar. Dengan langkah-langkah strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai, memberikan manfaat yang lebih

luas bagi masyarakat sekitar Triwidadi. Kerja sama yang terjalin antara pemerintah kalurahan, BUM Kal, dan masyarakat juga menunjukkan sinergi yang baik dalam mengembangkan potensi kalurahan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, menemukan bahwa dalam pengelolaan usaha-usaha BUM Kal masih dilakukan secara mandiri oleh pengurus BUM Kal, yang menyebabkan kurangnya fokus dan efektivitas dalam menjalankan usaha. Selain itu koordinasi antar pengurus BUMKal juga belum berjalan secara maksimal. Kesibukan masing-masing pengurus dalam pekerjaan pribadi mereka menjadi faktor utama yang menghambat komunikasi dan sinergi dalam menjalankan operasional BUMKal. Akibatnya, pengambilan keputusan serta implementasi strategi usaha menjadi kurang efektif, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan BUMKal. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi pengurus serta kurang optimalnya perkembangan unit usaha yang ada. Maka di perlukan langkah strategis dalam mengatasi hal tersebut yakni, menentukan pengurus khusus untuk setiap unit usaha.

Dengan adanya pengurus yang fokus dalam mengelola masing-masing unit usaha agar dapat tercipta efisiensi kerja yang lebih baik, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan produktivitas dalam manajemen usaha. Selain dalam manajemen internal, saat ini, masih terdapat berbagai potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal oleh BUMKal, seperti sektor peternakan ayam petelur, wisata alam, dan sektor lainnya. Jika potensi-potensi ini dapat dikelola dengan baik oleh BUMKal, maka peluang peningkatan pendapatan akan semakin besar, serta dapat memberikan manfaat

ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Sehingga perlu adanya revitalisasi melalui penunjukan pengurus di setiap unit usaha serta pengelolaan potensi ekonomi yang lebih maksimal, diharapkan BUMKAL Triwidadi dapat berkembang lebih baik, meningkatkan pendapatan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Potensi Kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Triwidadi dengan fokus yaitu Program Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Potensi Kalurahan dan Kerja Sama Dalam Pengembangan Potensi Kalurahan. Pemerintah kalurahan memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengoptimalkan potensi yang ada. Melalui berbagai program pengembangan, seperti penyertaan modal, pelatihan, dan dukungan infrastruktur, pemerintah kalurahan berupaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli kalurahan.

Oleh karena itu, berikut kesimpulan mengenai Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Potensi Kalurahan melalui BUM Kal sebagai berikut:

##### **1. Program Pengembangan Potensi Kalurahan**

Program pengembangan potensi kalurahan di Triwidadi menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi sumber daya yang ada. Dengan memberikan penyertaan modal kepada BUM Kal oleh pemerintah kalurahan dapat menjadi upaya dalam mengembangkan usaha-usaha BUM Kal dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengembangkan potensi kalurahan, baik dari segi

sumber daya alam, manusia, maupun infrastruktur. BUM Kal Triwidadi berfungsi sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi lokal dengan mengelola berbagai unit usaha, seperti penyewaan lapak, katering, event organizer, jasa keuangan (admin transfer), penyediaan ATK, pengadaan barang dan jasa. Usaha-usaha ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kalurahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sehingga daya penting dalam program ini adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada potensi lokal. Dengan adanya dukungan modal dari pemerintah kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal), diharapkan BUM Kal dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. BUM Kal yang mengelola berbagai unit usaha, seperti penyewaan lapak, katering, dan event organizer, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Rekomendasi untuk menjadikan BUM Kal sebagai penyedia utama dalam kegiatan-kegiatan kalurahan, seperti pengadaan barang dan jasa, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan BUM Kal. Selain itu, dukungan dalam bentuk penyertaan modal dan pembangunan infrastruktur, seperti lapak-lapak untuk pedagang, juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM.

Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan hasil belum optimal. BUM Kal Triwidadi



masih mengalami kesulitan dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional. Tren pendapatan bruto BUM Kal Triwidadi menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan peningkatan dan penurunan pendapatan yang signifikan. Pendapatan yang diperoleh masih minim, sementara biaya operasional terus berjalan, mengakibatkan kerugian dan belum adanya kontribusi nyata terhadap pendapatan kalurahan.

Pengelolaan usaha-usaha BUM Kal masih dilakukan secara mandiri oleh pengurus BUM Kal, yang menyebabkan kurangnya fokus dan efektivitas dalam menjalankan usaha. Selain itu koordinasi antar pengurus BUMKal juga belum berjalan secara maksimal. Kesibukan masing-masing pengurus dalam pekerjaan pribadi mereka menjadi faktor utama yang menghambat komunikasi dan sinergi dalam menjalankan operasional BUMKal. Akibatnya, pengambilan keputusan serta implementasi strategi usaha menjadi kurang efektif, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan BUMKal.

Hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi pengurus serta kurang optimalnya perkembangan unit usaha yang ada. masih terdapat berbagai potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal oleh BUMKal, seperti sektor peternakan ayam petelur, wisata alam, dan sektor lainnya. Jika potensi-potensi ini dapat dikelola dengan baik oleh BUMKal, maka peluang peningkatan pendapatan akan semakin besar.

## 2. Kerja Sama dalam Pengembangan Potensi Kalurahan

Kerja sama dalam pengembangan potensi kalurahan adalah salah satu strategi penting yang kerap kali dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, BUM Kal Triwidadi lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan vendor dan produsen barang serta jasa, serta organisasi swasta, dibandingkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan tujuan bisnis dan pengembangan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Dengan fokus kerja yang sama pada cakupan masyarakat setempat, BUM Kal berupaya memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah kalurahan, sehingga perputaran ekonomi tetap berada di dalam kalurahan. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi BUM Kal, tetapi juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat sekitar. BUM Kal juga aktif dalam menjalin kemitraan dengan organisasi lokal, seperti Karang Taruna dan PKK, untuk memanfaatkan layanan dan produk yang disediakan dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan. Dengan cara ini, BUM Kal berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung keinginan dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, BUM Kal berkomitmen untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dalam sektor katering dan pengadaan barang yang melibatkan usaha masyarakat di Triwidadi, sehingga keuntungan ekonomi dapat dinikmati oleh warga sekitar. Strategi ini menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima

manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Kalurahan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang di bahas pada bab sebelumnya dan kesimpulan diatas, maka peneliti hendak memberikan beberapa catatan berupa saran mengenai “Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Potensi Kalurahan” sebagai berikut:

1. Peningkatan pelatihan dan edukasi kepada pedagang dalam kemampuan berwirausaha. Pemerintah kalurahan dan BUM Kal perlu mengadakan lebih banyak pelatihan dan lokakarya untuk masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk agar pelaku usaha dapat lebih kompetitif dan mandiri. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha dan meningkatkan pendapatan.
2. Optimalisasi kerja sama dengan pihak eksternal guna meningkatkan kemampuan dan akses. Upaya ini di perlukan karena dengan menjalin kemitraan seperti Lembaga swasta, perguruan tinggi dan BUM Kal di kalurahan lain dapat membuka akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing BUM Kal. Dengan demikian, BUM Kal dapat meningkatkan kemampuan dan akses untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha. Contohnya seperti usaha di bidang pariwisata, pertanian, dan kerajinan lainnya.

3. Mengembangkan usaha BUM Kal dengan memperluas jenis usaha. Hal ini dapat di pertimbangkan sebagai upaya agar dapat menjajaki peluang baru yang sesuai dengan potensi lokal. Sehingga dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis usaha dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, BUM Kal dapat meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar dan meningkatkan pendapatan.
4. Membentuk tim pengurus unit usaha sebagai usaha agar meningkatkan efisiensi kerja dari pengurus BUMKal. Pengurus unit usaha dapat terdiri dari orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengelola unit usaha terkait. Dengan adanya pengurus yang fokus dalam mengelola masing-masing unit usaha agar dapat tercipta efisiensi kerja yang lebih baik, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan produktivitas dalam manajemen usaha.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja guna meningkatkan efektivitas kerja dari BUM Kal dan pemerintah kalurahan triwidadi. Dengan evaluasi yang sistematis, pemerintah daerah dan BUM Kal dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, program dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlani, I. N. (2017). Penerapan Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 52-70.
- Andriyani, F. (2021). Management of Village Potentials by Village-Owned Company of North Sangatta Village, Kutai Timur District. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i1.4>
- Ari Susanti, E., Hanafi, I., & Adiono, R. (2013). Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 31-40.
- Atmajaya, C. R. A., Savera, V. H., Harefa, N. N., Sagala, G. K. S., Amazia, L., Silalahi, J., ... & Prayudi, M. (2022). Peningkatan Perekonomian melalui Optimalisasi Potensi Desa Watugajah Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, 2(1).
- Bawono, I. R. (2019). *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dan, M., Pengangguran, P., Desa, D., Kecamatan, T., Kabupaten, T., Oleh, B., Kadek Darwita, I., Dewa, D., & Redana, N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pemberdayaan. In *Locus Majalah Ilmiah FISIP* (Vol. 9, Issue 1).
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan badan usaha milik desa (BUM Desa) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 51-60.
- Diartho, H. C. (2017). Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUM DESA di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(2), 200-218.
- Diwangga, D. G. (2021). Pengembangan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Ekonomi Kreatif, P., Masruroh, N., & KHAS Jember, U. (2023). *GLOBAL EDUCATION JOURNAL Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui The Government's Role in Developing Village Potential through Creative Economy Education*. 1(2).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.

- Engkus, E., Sakti, F. T., & Suparman, N. (2020). Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441-448.
- Harun, C. A., Tui, F. P. D., & Tantu, R. (2024). Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), 636-651.
- Harun, C. A., Tui, F. P. D., & Tantu, R. (2024). PENGELOLAAN POTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), 636-651.
- Hidayat, M., Latief, F., & Nurhaedah, Z. (2022). PENINGKATAN DAYA SAING BUM DESA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN POTENSI LOKAL DESA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 3400-3414.
- Hidayat, O., & Ramadhani, M. M. (2022). Pemberdayaan Dan Peningkatan Potensi Kearifan Lokal Daerah, Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 5(1), 32-39.
- Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto, D. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1061-1076.
- KINDANGEN, I. L., PANGKEY, M., & TAMPONGANGOY, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51).
- Kusuma, D. C. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)(Studi Pada Unit Simpan Pinjam BUM Desa Maju Makmur Desa Minggir Sari Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Lexy, O., Malani, F., Tumengkol, S. M., & Lumintang, J. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara* (Vol. 14, Issue 1).
- Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa

Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 187.  
<https://doi.org/10.32400/iaj.31055>

- Maesaroh, S., Saputra, A. W., & Suryani, R. (2022). MENINGKATKAN OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN BUM DESA MELALUI STRATEGI MANAJEMEN USAHA YANG MANDIRI DAN PROFESIONAL PADA BUM DESA DI DESA WANADADI. *Fokus ABDIMAS*, 1(1), 58-64.
- Mahardika, M. G., & Suseno, H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Transformative*, 4(1), 57-67.
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 87-94.
- Mattoasi, M. (2022). Efektivitas Pengelolaan Potensi Desa di Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 1(2), 157-161.
- Mutmainnah, N. I. M. (2024). *ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI DESA KASERALAU KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Parepare).
- Nasfiza, Y., Erlinda, S., & Supentri, S. (2024). Efektivitas Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Koto Sentajo Kerjasama Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Koto Sentajo. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4752-4758.
- Nomor, P. G. D. I. Y. (2). Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.
- Novita, F., Zulkarnain, I., & Harahap, F. R. (2024). Pengaruh Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sedulang Jaya Terhadap Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa Lalang Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4.
- Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Studi BUM Desa Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). *Publika*, 8(5).
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). Pemerintahan desa.
- Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif.

- Sari, N. K. (2018). Pengelolaan Potensi Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 150-158.
- Semaun, F. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 17-35.
- Siagian, G. J. A., & Sitorus, A. B. (2024). Analisis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) desa melalui pengembangan badan usaha milik desa (BUM Desa). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(1), 34-45.
- Simangunsong, F. (2015). Kajian Penggalian Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 5(1), 38-49.
- Soekidjo, N. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). *PT. Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia*.
- Sudirno, D., Kholiq, A., Masduki, M., Dani, U., Nahdi, D. S., Mulyani, H. S., & Suparto, L. (2020). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Pengelolaan Lingkungan Dan Potensi Desa Di Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 16-21.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sukowati, E. D., Februati Trimurni, D., & Si, M. (2023). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara. In *Journal of Science and Social Research* (Issue 2). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Tamonob, A. M., & Manubulu, H. A. (2023). OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI DESA BUM DESA KONBAKI KECAMATAN POLEN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13-16.
- Village, I. T., & District, E. Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Optimalisasi Peran BUM Desa Di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.
- Widjaja, H. A. W. (2014). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh, *PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta*.
- Wijaya Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Abstrak, N. (2023). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan








Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor). In *Bulan Mei* (Vol. 10, Issue 1).

Yuliawati, R. (2017). Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 505-510.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.		<p>Bersama Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah Triwidadi (23 Januari 2025)</p>
2.		<p>Bersama Bapak Mulyadi selaku Kasi kesejahteraan dan pembangunan/Ulu-ulu (22 Januari 2025)</p>
3.		<p>Bersama Ibu Anita Yulia Fatmawati selaku Carik Triwidadi (22 Januari 2025)</p>

4.		<p>Bersama Bapak Ruswanto selaku Ketua Bamuskal Triwidadi (23 Januari 2025)</p>
5.		<p>Bersama Bapak Eko Setiawan selaku Direktur BUM Kal Triwidadi (26 Januari 2025)</p>
6.		<p>Bersama Bapak Subiyana selaku Masyarakat Triwidadi (28 Januari 2025)</p>
7.		<p>Bersama Bapak Edi Irwanto selaku Bendahara BUM Kal Triwidadi (05 Februari 2025)</p>

8.		Bersama Mas Riski selaku masyarakat Triwidadi (01 Februari 2025)
9.		Alun-alun Triwidadi
10		Koordinasi Pamong dan Kelembagaan Kalurahan Triwidadi
11		Kegiatan Olahraga Masyarakat di Alun-alun Triwidadi

12		Kegiatan Sosialisasi di Kantor Kalurahan Triwidadi
13		Ruko tempat usaha ATK
14	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI NOMOR : 06 Tahun 2022 TANGGAL : 27 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR Badan Usaha Milik Desa "TRIWIDADI"</p> <p style="text-align: center;">MUKADIMAH</p> <p>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.</p> <p>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.</p> <p style="text-align: center;">BAB I NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha Milik Desa ini bernama "TRIWIDADI".</li> <li>2. Badan Usaha Milik Desa "TRIWIDADI" ini berkedudukan di Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.</li> </ol>	AD/ART BUM Kal Triwidadi







15

NERACA Per 31 Desember 2024					
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
<b>AKTIVA</b>					
<b>AKTIVA LANCAR</b>					
<b>KAS</b>					
Kas Kecil	38,340,826	41,384,600	20,506,000	18,804,995	171,175
<b>BANK</b>					
Bank BPD DIY	37,209,270	25,345,860	41,391,058	10,172,871	3,702,650
<b>PERSEDIAAN</b>					
Persediaan Barang	-	-	-	-	-
<b>PIUTANG USAHA</b>					
Piutang Lapak	-	-	-	-	4,290,000
Piutang Agen	-	-	-	1,200,000	-
Piutang Catering	-	-	-	-	6,240,000
Piutang Lainnya	-	-	-	-	291,390,630
<b>TOTAL AKTIVA LANCAR</b>	<b>75,550,096</b>	<b>66,730,460</b>	<b>61,897,058</b>	<b>30,177,866</b>	<b>305,794,455</b>
<b>INVENTARIS</b>					
Inventaris Komputer	-	-	-	5,160,000	5,160,000
Inventaris Kantor	6,000,000	6,000,000	6,000,000	10,399,005	10,399,005
Inventaris Gerobak	-	94,000,000	94,000,000	94,000,000	94,000,000
Inventaris Lapak	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000
<b>TOTAL INVENTARIS</b>	<b>6,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>159,559,005</b>	<b>159,559,005</b>
Akm. Penyusutan Inventaris Komputer	-	-	-	(258,000)	(1,290,000)
Akm. Penyusutan Inventaris Kendaraan	-	-	-	-	-
Akm. Penyusutan Inventaris Kantor	(1,200,000)	(2,400,000)	(3,600,000)	(5,019,951)	(7,099,755)
Akm. Penyusutan Inventaris Gerobak	-	(12,533,360)	(31,333,400)	(50,133,440)	(68,933,480)
Akm. Penyusutan Inventaris Lapak	-	-	(416,668)	(5,416,684)	(10,416,700)
<b>TOTAL PENYUSUTAN INVENTARIS</b>	<b>(1,200,000)</b>	<b>(14,933,360)</b>	<b>(35,350,068)</b>	<b>(60,828,075)</b>	<b>(87,739,935)</b>
<b>TOTAL AKTIVA TETAP</b>	<b>4,800,000</b>	<b>85,066,640</b>	<b>114,649,932</b>	<b>98,730,930</b>	<b>71,819,070</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>80,350,096</b>	<b>151,797,100</b>	<b>176,546,990</b>	<b>128,908,796</b>	<b>377,613,525</b>
<b>PASIVA</b>					
<b>HUTANG LANCAR</b>					
<b>HUTANG LANCAR</b>					
Hutang Catering	-	-	-	-	976,000
Hutang ATK	-	-	-	-	1,480,000
Hutang Event Organizer	-	-	-	-	60,939,760
Hutang Pengadaan Barang	-	-	-	-	40,178,370
Hutang Honor Pengurus	-	-	-	-	4,900,000
Pendapatan Yang Diunggulkan	-	-	-	-	4,809,000
<b>TOTAL HUTANG LANCAR</b>	<b>-</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113,283,130</b>
<b>MODAL</b>					
<b>MODAL USAHA</b>					
Modal Desa	75,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	325,000,000
Modal Hibah	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000
<b>TOTAL MODAL USAHA</b>	<b>75,000,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>225,000,000</b>	<b>225,000,000</b>	<b>375,000,000</b>
Laba / Rugi Tahun Lalu	-	5,350,096	(32,202,900)	(48,453,010)	(116,124,875)
Laba / Rugi Tahun Berjalan	5,350,096	(37,552,996)	(16,250,110)	(47,638,194)	5,455,270
<b>TOTAL LABA / RUGI DITAHAN</b>	<b>5,350,096</b>	<b>(32,202,900)</b>	<b>(48,453,010)</b>	<b>(96,091,204)</b>	<b>(110,669,605)</b>
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>80,350,096</b>	<b>151,797,100</b>	<b>176,546,990</b>	<b>128,908,796</b>	<b>377,613,525</b>

Neraca keuangan  
BUMKal

16

Anggaran Pendapatan  
Belanja Kalurahan  
Triwidadi 2025

17	 <p>SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  <b>PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN</b>  STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)  Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515889</p> <p>Nomor : 134/PEM/I/X/2024  Hal : <u>Penunjukan Dosen Pembimbingan Skripsi</u></p> <p>Kepada :  Dr. Gregorius Sahdan, M.A  Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"  di Yogyakarta.</p> <p>Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :</p> <p>Nama : Salfan Chalvin T.L Huki  No. Mahasiswa : 21520009  Program Studi : Ilmu Pemerintahan  Tanggal Acc Judul : 7 November 2024</p> <p>Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.</p> <p>Yogyakarta, 7 November 2024  Ketua Program Studi  </p>	Surat penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
18	 <p>YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  YOGYAKARTA  Akreditasi Institusi B</p> <p>Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515889, website: <a href="http://www.apmd.ac.id">www.apmd.ac.id</a>, e-mail: <a href="mailto:info@apmd.ac.id">info@apmd.ac.id</a></p> <p>Nomor : 14/I/I/2025  Hal : Permohonan ijin penelitian</p> <p>Kepada Yth :  Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul  Di tempat.</p> <p>Dengan hormat,  Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".</p> <p>Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :  Nama : Salfan Chalvin Turupaita Landunau Huki  No Mhs : 21520009  Program Studi : Ilmu Pemerintahan  Judul Skripsi : Penerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Potensi Kalurahan (Penelitian BUMKAL Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)  Tempat : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  Dosen Pembimbing : Dr. Gregorius Sahdan, M.A</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.</p> <p>Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Yogyakarta, 7 Januari 2025  Ketua    Dr. Sitoro Eko Yunanto  NID. 170 230 190</p>	Surat Permohonan ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PAJANGAN  
KALURAHAN TRIWIDADI  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦗꦁꦤꦺꦴꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦿꦶꦮꦢꦶ

Jl. Kayuhan-Sudimoro, Pajangan, Triwidadi, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751  
Website: <http://www.desa.triwidadi.bantulkab.go.id> e-mail : [desa.triwidadi@bantulkab.go.id](mailto:desa.triwidadi@bantulkab.go.id)

Nomor : 000.9.6.3/00007  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth:  
Ketua STPM APMD Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Dengan hormat,  
Berdasarkan surat dari STPM APMD Yogyakarta Nomor : 14/1/U/2025 tentang Permohonan Ijin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi. Dengan ini Kami Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : **SALFAN CHALVIN TURUPAITA LANDUNAU HUKI**  
NIM : 2152009  
Program Study : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Tema/Judul TAS : Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Potensi Kalurahan (Penelitian BUMKAL Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).  
Lokasi : Kalurahan Triwidadi  
Waktu : Januari-Februari 2025

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Triwidadi, 13 Januari 2025  
Lurah Triwidadi  
  
SLAMET RIYANTO

Surat Ijin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B

Alamat: Jl. Tenoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 560775, Fax. (0274) 515989, website: [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) e-mail: [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 9/1/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Salfan Chalvin Turupaita Landunau Huki  
Nomor Mahasiswa : 21520009  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
b. Sasaran : Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Potensi Kalurahan (Penelitian BUMKAL Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 6 Januari 2025  
Ketua  
  
Dr. Suforo Eko Yunanto  
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :  
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :  
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Tugas  
Pelaksanaan Penelitian



21



Lumbung Desa STPM "APMD"  
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Jl. Yos Sudarso 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225  
Email: perpustakaan@stpm.com telp 0271-7228-3177

### TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPM "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: SALFAN CHALVIN TURUPAITA LANDUNAU HUKI  
Judul makalah: PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN  
( Penelitian BUMKAL Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta )

Tanggal pemeriksaan: 17 Februari 2025  
Persentase plagiasi: 18%



Checked By:



Cek plagiasi

